



Agama Tanpa Pengikut

**Memudarnya Nilai-nilai Moralitas dan
Signifikansi Pengembangan Teologi Kritis**

Abd A'la

Keberagamaan tidak lebih dari sekadar upaya manusia untuk mendekati kebenaran yang hakiki. Karena itu, keberagamaan tidak akan pernah mengalami finalitas. Kondisi ini mengharuskan kesediaan mereka untuk melakukan penelanjangan diri terhadap kekurangan pemahaman keagamaan mereka dan kelemahan dalam mengaktualisasikan ajaran agama. Dengan demikian, keangkuhan beragama dalam segala bentuknya yang sering menimpa sebagian umat beragama dewasa ini dapat dihindari. Minimal, mereka tidak akan selalu jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama berkali-kali.

Abd A'la

IMPULSE adalah lembaga studi yang menjembatani tataran akademis dengan dunia praksis atas problem multikultur dalam ruang publik. Elaborasi akar epistemologis multikulturalisme dan pluralisme dilakukan melalui pendekatan struktural demi menghasilkan kajian yang komprehensif. Pengembangan wacana multikulturalisme dan pluralisme dilakukan melalui penerbitan buku, light research, fellowship, kegiatan sekolah, diskusi, short course, dan orasi budaya.

ISBN 978-979-21-2466-8

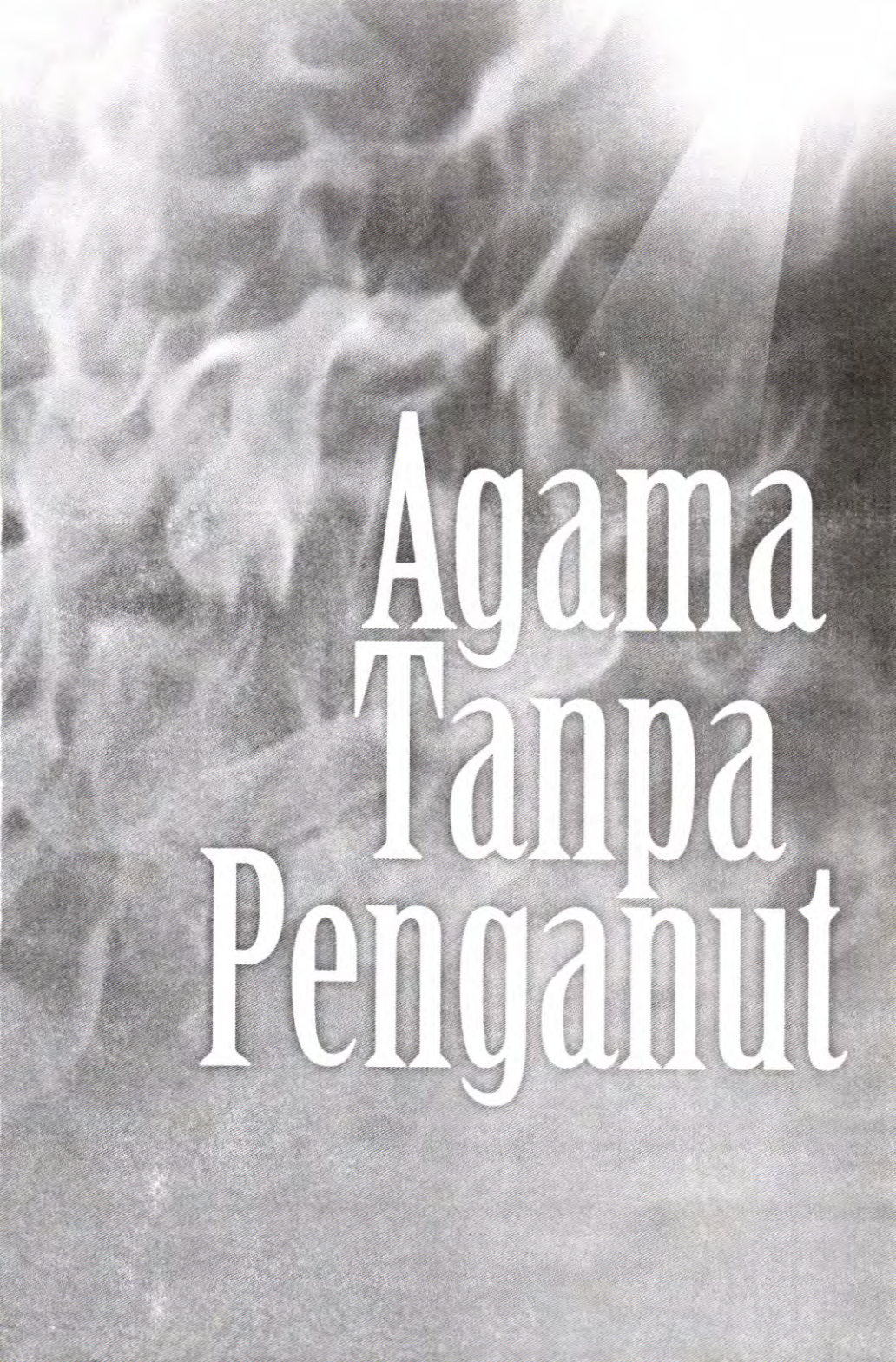


9 789792 124668

Penerbit Kanisius
Jl. Cempaka 9, Deresan
Yogyakarta 55281



072093



Agama Tanpa Pengikut



Agama Tanpa Pengikut

Memudarnya Nilai-nilai Moralitas dan
Signifikansi Pengembangan Teologi Kritis

Abd A'la



Penerbit Kanisius

Agama Tanpa Penganut

072093

© Kanisius 2009

Diterbitkan atas kerja sama:

IMPULSE, IAIN Sunan Ampel, dan Penerbitt-Per cetakan Kanisius

PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281, INDONESIA

Korak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (Impulse)

E-mail : office@impulse.or.id

Website : www.impulse.or.id

Cetakan ke- 5 4 3 2 1

Tahun 13 12 11 10 09

Editor : Saiful Amin Ghofur

Desain Sampul : Marius Santo

Desain Isi : *i-noeg*

ISBN 978-979-21-2466-8

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit

BAGIAN KEDUA:
PEMBACAAN KEMBALI SIMBOL DAN
RITUAL AGAMA

Keberagamaan Umat dan Signifikansi Teologi Kritis	69
Dari Konflik Menuju Dialog yang Dialogis	75
Signifikansi Peringatan Maulid	83
Signifikansi Isra' Mi'raj dalam Konteks Kekinian	87
Puasa Bersama Kaum yang Terpinggirkan	92
Puasa, Teologi Pengendalian menuju <i>Civil Society</i> yang Bermoral	97
Halal Bihalal:	103
Mengukuhkan Misi Damai Agama	103
Mudik, Mengais Spiritualitas	108
Idul Adha, Napak Tilas Monoteisme sebagai Sumber Moralitas	111
Mengembangkan Pendidikan Agama yang Mencerahkan	116

BAGIAN KETIGA:
MEMBACA KEMBALI AGAMA:
PENGEMBANGAN DEMOKRASI, DAN *CIVIL SOCIETY*

Nilai-Nilai Moral:	123
Kekuatan Melawan Perang dan Kekerasan	123
Urgensi Mengembalikan <i>American Civil Religion</i> ke Visinya yang Transformatif	128
Moralitas Demokrasi-Teologis, Kekuatan Melawan Kekerasan yang Dehumanistik	133

Pemberantasan Korupsi melalui Penegakan Demokrasi	138
<i>Civil Religion</i> , Pengembangan Keberagamaan Indonesia ke Depan	142
EPILOG:	
MEMBANGUN KEBERAGAMAAN YANG TULUS	146
DAFTAR KEPUSTAKAAN	151
PROFIL PENGARANG	157

KATA PENGANTAR

MENUJU KEBERAGAMAAN TRANSFORMATIF

MENUJU KEBERAGAMAAN TRANSFORMATIF

Seandainya dikatakan, sebagian besar umat beragama saat ini sudah meninggalkan agamanya, nyaris dipastikan atau kemungkinan besar mereka –kendati tidak semuanya –akan marah besar. Secara sepintas pernyataan semacam itu bisa dianggap provokatif. Namun jika melihat realitas yang ada, kita akan menyaksikan sesuatu yang bisa membenarkan ungkapan tersebut. Hal ini dapat dilacak dari keberadaan umat beragama yang menjalani kehidupan mereka dalam beragam paradoks. Misalnya dalam perspektif Islam, umat Islam merupakan wakil Tuhan di alam dunia ini yang diberi amanah untuk “memakmurkan” kehidupan. Mereka ditugaskan mengelola dan mengolah alam, membangun, serta melestarikan kehidupan menuju kesejahteraan paripurna, dan holistik bagi segenap penghuninya. Dalam perspektif yang lebih luas, semua penganut agama –berdasarkan ajaran agama masing-masing –dituntut untuk melabuhkan ajaran agama mereka yang pada prinsipnya bersifat moral. Moralitas luhur harus menjadi pijakan kokoh mereka dalam merajut dan mengembangkan kehidupan dalam semua aspeknya.

Menyikapi tuntutan agama tersebut, mereka tampaknya menyanggapi untuk melaksanakannya yang diejawantahkan melalui ritual dan seremonial keagamaan yang mereka laksanakan dari saat ke saat. Namun pada sisi ini paradoks itu mulai muncul. Mereka

tekun menjalankan ritual dan seremonial keagamaan, tapi pada saat yang sama mereka juga rajin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika dan moral. Sebagian mereka melakukan kejahatan yang pertentangannya mungkin "hanya" samar dan tipis dengan nilai-nilai agama; dan sebagian yang lain justru menyebarkan *munkarat* yang secara tegas berdiri diametral dengan etik dan akhlak agama. Pada umumnya, tindakan-tindakan amoral itu berada dalam tataran ranah publik, atau bersifat dosa sosial.

Keterkelupasan keberagamaan dari nilai moral agama tersebut tampak jelas ketika agama sekadar dijadikan alat legitimasi untuk kepentingan subyektif yang sempit dan pragmatis. Politik merupakan ranah yang begitu sering memerlukan agama untuk dibiaskan menjadi pembenar bagi syahwat-syahwat kekuasaan yang mengeram di balik politik tersebut. Kondisi ini terpapar secara kasat mata dari sikap dan perilaku (mayoritas?) kaum politisi yang menggunakan simbol-simbol agama untuk sekadar meraih atau memperteguh kekuasaan bagi mereka dan kelompoknya. Seiring itu, dengan penggunaan atribut-atribut keagamaan itu, mereka melakukan *othering* terhadap saingan mereka, baik yang seagama, apalagi yang berbeda agama. Dalam kondisi ini, tuduhan dan fitnah –yang tentunya berseberangan dengan nilai agama apa pun, bahkan dengan nilai kemanusiaan universal –menjadi menyatu dengan simbol agama yang mereka gunakan. Ironisnya, kendati realitas menunjukkan kesia-siaan memperlakut agama dalam dunia politik, para politisi, penguasa atau lainnya tidak jera, bahkan kian menguat dari saat ke saat, untuk melakukannya. Manakala mereka berkuasa, mereka terus menggerogoti nilai-nilai agama. Mereka tetap membiarkan –implisit atau eksplisit –perilaku bejat yang mengotori kehidupan, dari korupsi, ketidak-adilan, hingga konflik-berdarah. Bahkan bisa-bisa mereka termasuk pelaku atau punyai kaitan dengan perilaku biadab itu.

Selain dunia politik, ranah sosial dan lainnya juga tidak luput dari rembesan reduksi agama. Fenomena di sekitar kita menghadirkan foto diri umat beragama yang merepresentasikan secara utuh merebaknya –minimal kecenderungan –keberagamaan semacam itu. Meskipun temanya sama, yaitu pembiasan dan reduksi agama, gambar hidup itu sangat beragam *bak* pameran foto yang mempertontonkan tingkah polah umat beragama yang hadir dengan bedak tebal dan penuh dengan aksesoris agama, tapi badan mereka kudisan atau terkena penyakit yang lebih parah. Ambil satu contoh, mereka mengelat upacara keagamaan besar-besaran. Namun nuansa kesejukan, kelembutan, dan kesyahduan yang mencerminkan kehadiran sifat-sifat Tuhan sama sekali tidak terasa. Justru acara semacam itu disarati dengan kegiatan yang sering mengotori, merusak, atau mengganggu lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pola keberagamaan sejenis itu yang dicoba diangkat dalam buku ini. Religiusitas yang tanpa roh agama itu merupakan fenomena atau bahkan realitas yang nyaris menyatu dengan kehidupan umat beragama di hampir seluruh belahan dunia. Tentunya pola dan perwujudannya bisa ada perbedaan antara satu wilayah dan wilayah lain, antara satu penganut dan penganut agama yang lain. Namun terlepas dari perbedaan itu, ada benang merah yang merajut kuat yang menjadikannya sebagai satu jalinan; rangkaian keberagamaan yang cenderung meminggirkan sifat-sifat Tuhan dan moral ajaran agama yang prinsip.

Berdasar pada kenyataan itu, buku ini mencoba mengajak kepada setiap penganut agama untuk kembali kepada suatu keberagamaan yang diharapkan lebih menampakkan esensi agama itu sendiri. Sejatinya, para penganut agama sudah memiliki potensi dan modal untuk pencapaian ke arah sana. Namun hal ini seutuhnya tergantung kepada mereka.

Dalam konteks itu, buku yang berasal dari kumpulan tulisan ini dipublikasikan dan dihadirkan ke ruang publik. Melalui pembacaan yang kritis, karya ini diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keberagamaan kita –semua umat beragama –untuk menuju keberagamaan yang transformatif; keberagamaan yang dapat menyebarkan dan membumikan nilai-nilai luhur agama.

Dengan terbitnya buku ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Penerbit Impulse dan segenap jajaran Redaksi, Editor, dan seluruh karyawan, yang semuanya berjibaku untuk penerbitan kumpulan tulisan penulis. *Matur nuwun* yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Mas Tommy, yang tanpa pertimbangan untung-rugi, tapi semata-mata komitmen untuk mengembangkan keberagaman yang lebih mencerahkan, bersedia menerbitkan karya ini. Ungkapan terima kasih juga saya haturkan untuk Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si yang merekomendasikan penulis untuk menerbitkannya di Impulse. Terima kasih pula untuk Mas Habib yang mengenalkan penulis ke Mas Tommy, dan kepada Mbak Hany dari Impulse yang tidak bosan-bosannya selalu berkomunikasi dengan penulis.

Harapan penulis, karya ini dapat bermanfaat, minimal sebagai refleksi untuk membangun keberagamaan yang lebih berarti bagi kita dan kehidupan. Di atas semua itu, semoga karya ini mempunyai nilai –sesedikit apa pun –di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Surabaya, awal Juli 2009

aa

Kekerasan yang dipaparkan ini hanya merupakan secuil contoh dari *scabreg* kekerasan yang ada di sekitar kita. Contoh ini diangkat hanya untuk menunjukkan betapa kekerasan telah begitu melekat pada kehidupan umat manusia. Bahkan bagi sebagian orang atau kelompok, kekerasan sudah dijadikan semacam "budaya". Mereka "menyelesaikan" hampir semua persoalan yang dihadapi dengan cara kekerasan. Ironisnya, kebiadaban ini justru berlangsung di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang sedang berada dalam perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kenyataan itu menunjukkan betapa humanitarianisme serta agama sebagai sumber nilai tidak berperan nyata dalam mengantarkan umat manusia menuju kehidupan yang lebih sejahtera, tenang, dan penuh kedamaian. Agama lalu menjadi sekadar simbol yang penuh dengan ritual-ritual formal yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kehidupan konkret. Nilai-nilai yang terdapat di balik ibadah tidak disentuh secara serius untuk diaplikasikan secara utuh dalam hidup keseharian umat.

Tillich dengan telak menyindir kenyataan itu. Ia menyatakan (sebagaimana ditulis Henderson, Jr.), gereja (agama) telah kehilangan fungsi karena nilai-nilainya tidak mampu lagi menyentuh kehidupan yang nyata. Kata-kata orang yang saleh, khotbah dan doa diucapkan berungkali tanpa makna sedikit pun, dan ungkapan para teolog tidak lagi memiliki hubungan dengan keinginan aktual masyarakat.

Fenemona seperti itu nyaris tidak banyak berbeda dalam dunia Islam. Khotbah Rasulullah (saw) pada haji *wada'* (Haji terakhir Nabi) tentang kesamaan umat manusia dan ketidakbolehan manusia melakukan kekerasan terhadap manusia yang lain tidak pernah diwujudkan secara konkret dalam kehidupan umat Islam saat ini. Setiap tahun berjuta-juta umat Islam melaksanakan haji ke Mekkah, tapi kekerasan dan semacamnya terus terjadi, baik antar-sesama Muslim atau antara umat Islam dan umat yang lain.

Salah satu faktor ketidakmampuan agama dalam memberikan landasan bagi penciptaan kehidupan yang damai dan sejahtera terletak pada mandulnya teologi dalam menangkap perkembangan realitas kehidupan. Teologi yang berkembang saat ini masih didominasi oleh *defensive teologia* yang *theistic-oriented* dan sangat kental dengan karakter yang eksklusif. Teologi semacam itu menitikberatkan bahasannya pada upaya dan cara memperkokoh keimanan transenden semata sehingga nilai-nilai imanen yang terkandung pada aspek akidah dan ibadah dibiarkan terbengkalai. Maka keimanan yang dikembangkan dalam konstruksi teologi tersebut tidak mampu menjadi *worldview* yang berfungsi sebagai landasan etika-moral bagi kehidupan umat manusia.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang atau sejumlah penganut agama bisa saja hidup dalam simbol-simbol yang penuh agama, tapi sikap dan perilaku mereka tidak mencerminkan sama sekali nilai-nilai substantif agama. Amerika Serikat dapat saja mengklaim diri mereka dengan semboyan "*In God We Trust*". Demikian pula umat Islam Indonesia dapat mengklaim sebagai bangsa yang religius, sebagaimana kelompok Wahabi di Arab sana mengaku sebagai umat Islam dengan kepegangan yang murni dan *genuine*. Namun di tingkat praksis, mereka mungkin saja melakukan suatu tindakan yang bertentangan seratus delapan puluh derajat dengan nilai dan ajaran agama mereka sendiri.

Dari belahan dunia paling barat ke belahan paling timur, kekerasan, tindakan anarkis, pembunuhan, serta penindasan dalam beragam bentuk dan cara terus berlanjut. Semua itu dilakukan justru oleh orang, kelompok, atau bangsa yang mengaku diri mereka sebagai manusia yang beragama. Hal itu terjadi karena teologi tak lebih dari sekadar *intellectual exercise* yang mementingkan aspek retorik semata.

nilai monoteisme al-Quran, misalnya, akan terkait erat dengan upaya pembebasan manusia dari ketidakadilan, penindasan dan kekerasan.

Dalam bahasa yang lain, teologi hendaknya mampu membaca tanda-tanda zaman. Artinya, seperti sudut pandang Dick Hartoko (w. 2001) yang Kristiani, gereja tidak boleh terasing dari dunia. Untuk itu gereja perlu memperhatikan tanda-tanda zaman, yaitu fenomena-fenomena yang begitu umum dan acapkali terjadi sehingga dapat menjadi karakteristik untuk zaman sekarang dan menandakan kebutuhan dan harapan umat manusia pada zaman ini (lihat Sindhunata, 2001: 3). Dari itu, ketika kekerasan menjadi fenomena, teologi hendaknya memiliki kepedulian yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan itu dan akar-akar yang menimbulkannya.

Atas dasar itu, teologi dituntut untuk menjadi upaya pemahaman umat manusia terhadap ajaran dasar agama mereka masing-masing, dan menangkap nilai-nilainya yang substantif dengan mengkaitkannya dengan konteks kekinian. Upaya itu dikembangkan sebagai landasan yang kokoh bagi keseluruhan sikap dan perilaku mereka. Dengan demikian, kita memerlukan suatu reformulasi dan pengembangan lebih jauh dari teologi yang berkembang saat ini. Sebagai prinsip dasar, teologi tentunya harus dapat memberikan keteduhan iman bagi pemeluknya. Namun pada saat yang sama, teologi hendaknya mampu memberikan gambaran tentang nilai-nilai kesamaan dan perbedaan pada tiap-tiap agama, sekaligus meletakkan kesamaan dan perbedaan itu sebagai landasan untuk melakukan kerjasama di antara semua para penganut agama tanpa harus kehilangan identitas dan jati diri masing-masing. Pengembangan kerjasama tersebut diarahkan kepada pembebasan umat manusia dari segala nilai, sikap, dan perbuatan yang dehumanistik, serta menggantikannya dengan nilai-nilai yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan Yang Mahakasih, adil, penuh rahmat, dan seumpamanya.

• • •

tidak dianut umatnya sebagaimana tuntutan ajaran agama Islam itu sendiri. Maka, ketika Islam mengajarkan tentang penyebaran rahmat, umatnya justru melakukan pengrusakan dan kekerasan di muka bumi. Itulah yang banyak terjadi dewasa ini. *Na'udzubillah*©.

sampai derajat tertentu, mereka menjalankan ritual lebih bersifat sebagai pameran.

Dalam bentuk yang moderat, mereka yang beragama dengan model ini menjalankan ajaran ritual agama sebagai upaya penebusan atas dosa-dosa mereka. Demikian pula penganut keberagamaan ini aktif melakukan kegiatan sosial karitatif. Mereka biasanya tekun melaksanakan ibadah, tapi pada saat yang sama mereka juga melakukan praktik jahat yang merugikan manusia lain. Dengan menekuni ibadah ritual, mereka berharap nanti bisa terselamatkan di akhirat.

Penganut keberagaman ini pada umumnya tidak memiliki kepedulian cukup memadai terhadap aspek moralitas. Bahkan sampai batas tertentu, nilai-nilai etika-moral sama sekali diabaikan. Mereka menyebut Tuhan, dan menggunakan atribut agama demi kepentingan diri sendiri yang sangat subyektif. Mereka tidak menjadikan agama sebagai sumber rujukan dan inspirasi moral dalam sikap dan perilaku keseharian mereka.

Keberagamaan ritualisme-eksibisionis biasanya menjangkiti figur yang dianggap (tepatnya, diri mereka sendiri menganggap) sebagai tokoh masyarakat, elit politik, penguasa dan sebagainya. Mereka beragama lebih banyak dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, dan sekaligus mengharapkan keselamatan akhirat. Dilihat dari sisi manapun, keberagamaan mereka sangat kental dimuati pragmatisme. Sikap ini pada gilirannya menjadikan mereka –sengaja atau tidak –sering “mengelabui” atau memperlalat masyarakat, bahkan Tuhan.

Dalam kenyataannya, keberagamaan ini tidak pernah berkembang sebagai gerakan melembaga sebagai suatu organisasi formal. Kemunculan dan berkembangnya religiusitas ini lebih bersifat individual sehingga antara satu dengan yang lain yang sama-sama terperangkap dalam pola keberagamaan ini tidak memiliki jaringan

atau bahkan hubungan sama sekali. Kendati demikian, hal itu menggejala kuat dalam masyarakat. Karena itu, berkembangnya pola agama yang demikian cukup mengkhawatirkan, serta akan berdampak negatif bukan hanya pada agama, tapi pada masa depan bangsa dan masyarakat. Ia akan menggrogoti nilai-nilai luhur moralitas yang sesungguhnya merupakan salah satu fondasi utama bangsa.

Keberagamaan Simbol-Minimalis

Selain itu, keberagamaan simbolis menampakkan diri dalam bentuk simbol-minimalis. Karakteristik utama religiusitas ini terletak pada keberadaan agama sebagai identitas diri semata. Para penganutnya menyikapi agama secara minimal dalam bentuk sekadar pengakuan terhadap agama dan Tuhan. Selebihnya, mereka tidak pernah lagi atau jarang mendekati Tuhan. Ajaran-ajaran ritual agama tidak pernah dijalankan, atau paling *banter* hanya dilakukan dalam waktu tertentu. Bagi mereka, dengan menyatakan beragama, mereka berharap Tuhan akan menyelamatkan mereka di akhirat.

Keberagaman ini sangat sulit untuk menumbuhkan kedalaman spiritualitas dan memberikan pijakan moralitas, individual dan sosial kepada penganutnya. Mereka beragama, namun pada saat yang sama, mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai agama, bahkan merugikan orang lain dan masyarakat luas. Bahkan sebagian mereka ada yang tidak mampu membedakan agama dengan persoalan-persoalan yang bernuansa magis. Dengan demikian, mereka membuat adonan yang mencampurbaurkan kedua unsur yang bertentangan ini menjadi semacam *black religion*. Hasilnya adalah menguatnya semacam ilusi dan hayalan yang sering dijadikan pijakan untuk melakukan tindak kejahatan dalam kehidupan nyata.

Fenomena yang ada menunjukkan, kendati hanya beragama sebatas KTP, serta tidak pernah atau hanya sesekali menjalankan

sufficiency yang sering terperangkap ke dalam arogansi moral yang sampai derajat tertentu bisa menghasilkan budaya yang jauh dari pandangan kritis dan introspektif (Lihat Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Theology of Power*, 2000).

Hal ini tampak jelas dalam pengembangan gagasan-gagasan mereka yang bersifat klaim kebenaran sepihak. Pada umumnya mereka menganggap bahwa pandangan mereka merupakan cerminan otentik dari ajaran agama, serta menjadikannya sebagai dogma yang tidak boleh diotak-atik dan dikritisi. Pada saat yang sama, mereka meminggirkan pandangan-pandangan lain yang berbeda, apalagi yang bertentangan dengan pendapat mereka. Mereka menyikapinya sebagai sesuatu yang salah, atau bahkan sesat.

Sikap mereka yang anti-Barat senyatanya merupakan ideologi politik yang sarat dengan orientasi kekuasaan. Karena itu, tujuan mereka yang utama bukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai partikular di dalam budaya Islam, tapi lebih bersifat memperkuat Islam terhadap rival budayanya. Dalam konteks ini, mereka (masih kata El Fadl) sebenarnya mengalami perasaan kalah, frustrasi, dan teralienasi bukan saja terhadap institusi kekuatan modernitas, tapi juga terhadap warisan dan tradisi Islam. Dengan demikian, sebagai kompensasinya, mereka mengembangkan sikap arogansi benar sendiri *vis-à-vis* kelompok lain yang berbeda. Arogansi mereka ini kadangkala, atau bahkan sering, ditampakkan melalui pola-pola yang bisa merugikan orang lain dari "sekadar" menuduh kelompok lain sesat, atau kafir hingga penyebaran ancaman yang bersekat tipis dengan aksi-aksi teroristik.

Ada benarnya jika dikatakan, fundamentalisme Islam yang demikian tidak bisa menawarkan visi politik dunia yang secara kultural sangat beragam. Alih-alih, mereka (menurut Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism*, 1998: 91) mengklaim, mereka memiliki risalah ilahi yang absolut dan abadi yang harus disampaikan –dan

jika memungkinkan –dipaksakan ke seluruh umat manusia. Sikap semacam itu mengantarkan mereka kepada suatu kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya ruang yang cukup untuk dialog dan sejenisnya, baik dengan kelompok lain, maupun dengan realitas kehidupan yang mereka hadapi. Bagi mereka, risalah ilahi yang mereka emban karena sifatnya telah final dan paripurna bagaimana pun juga harus dilabuhkan ke dalam kehidupan sebagaimana apa adanya, tanpa kompromi dan tawar menawar lagi. Ujung-ujungnya adalah penegakan kekuasaan yang bersifat ilahi di muka bumi ini.

Pada altar ini persoalan krusial mengedepan. Dalam realitasnya, kekuasaan ilahi yang mereka klaim justru sering berseberangan nilai-nilai keilahian yang seutuhnya bersifat moral. Sejarah dan realitas kekinian menunjukkan, aksi yang mereka kembangkan tampaknya sulit untuk dilabuhkan ke dalam nilai-nilai moralitas yang mencerminkan keluhuran dan kearifan. Dengan klaim kebenaran sepihak yang dipegangnya, mereka tampak terperangkap ke dalam keangkuhan yang memproduksi kekerasan dalam beragam bentuknya, struktural, budaya, dan fisik. Sikap dan aksi ini jelas akan membuat nilai-nilai moral yang ilahi atau humanistik menjadi terkorbakan. Kekuasaan ilahi yang mereka gemakan tak lebih dari sekadar untuk mencapai target utama mereka, yaitu melawan Barat dan kelompok lain yang berbeda.

Karena itu, alih-alih Islam merupakan visi moral yang berkaitan dengan humanitas, mereka mengembangkan Islam yang dikonstruksi sebagai antitesis Barat. Islam sekadar tameng untuk melakukan penentangan terhadap Barat, bahkan terhadap intelektualitas Islam sendiri. Akibatnya, tradisi intelektualitas Islam yang sampai derajat tertentu memiliki kepedulian atas persoalan moralitas kemanusiaan menjadi tergerus, berganti dengan dogma mati yang bukan saja mengabaikan aspek-aspek moral, tapi juga menjadikan agama sebagai

alat kekuasaan, dan sarana untuk melawan orang atau kelompok yang tidak disukai.

Sebagai kesimpulan, pola keberagamaan simbolis dalam beragam bentuknya itu sulit diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kemanusiaan, terutama pada masa kontemporer ini. Justru religiusitas tersebut bisa menjadi persoalan atau ancaman serius bagi kehidupan dan umat manusia sendiri. Karena itu, diperlukan rekonstruksi keberagamaan yang seutuhnya memiliki komitmen moral terhadap umat manusia dan beragam persoalannya.

ISLAM AND THEOLOGY OF POWER DALAM KONTEKS INDONESIA

Islam and the Theology of Power sebenarnya judul artikel yang ditulis Khaled Abou El Fadl dalam *Middle East Report* 2001 lalu. Dalam tulisannya ia menyatakan, kekuasaan dan simbol-simbol yang berkaitan dengan hal itu merupakan perhatian utama dan nyaris satu-satunya dari gerakan puritanisme fundamentalistik. Saya tertarik untuk meminjam judul tersebut dan mengontekstualisasikannya dengan Indonesia karena teologi kekuasaan tampaknya juga menjadi anutan sebagian umat Islam Indonesia meski dengan pemaknaan yang agak lain dan karakteristik yang berbeda dari yang disandera oleh intelektual Muslim dari UCLA itu.

Abou El Fadl menjelaskan, gerakan puritanisme merupakan gerakan yang berawal dari sikap bernuansa apologetik dengan ciri *intellectual self-sufficiency* yang cenderung arogan. Mereka beranggapan, Islam mencakup dan juga telah membicarakan segala-galanya. Isu-isu kontemporer, semuanya telah ada dalam Islam jauh sebelum Barat mengangkatnya. Namun ketika berhadapan dengan realitas, di mana hegemoni Barat begitu kuat dan institusi modernitas begitu dominan, mereka terjebak ke dalam perasaan kalah, frustrasi dan alienasi.

Untuk melawan itu, mereka –masih kata El Fadl –mengembangkan teologi kekuasaan yang bercirikan pengangkatan simbol-simbol dan gerakan kekuatan yang tanpa kompromi dan bahkan arogan, bukan

ingin masuk jaringan kekuasaan sekadar bermodalkan kharisma tanpa diimbangi visi dan misi yang jelas. Parahnya lagi, mereka terhegemoni Teologi Kekuasaan sehingga beranggapan hanya melalui kekuasaan semacam itu mereka dapat "berjuang" *membumikan* atau *menyebarkan* Islam. Itu pun dalam pengertiannya yang berbeda-beda, mulai dari yang substansial dalam bentuk pengembangan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan, hingga dalam maknanya yang eksklusif berupa penegakan Islam formal dan simbolnya dari atas.

Terlepas Islam model apa yang ingin dikembangkan, teologi kekuasaan cenderung menafikan signifikansi pengembangan Islam dari bawah. Teologi semacam itu cenderung menyikapi masyarakat sebagai obyek yang direkayasa dari atas, bukan sebagai subyek yang memiliki hak seutuhnya untuk mengembangkan diri dan kehidupan mereka sesuai dengan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan mereka, serta situasi konkret yang dihadapi mereka.

Jika Abou El Fadl menyatakan, teologi kekuasaan kurang menghargai tradisi dan warisan Islam, maka dalam konteks Indonesia, teologi kekuasaan yang dianut beberapa tokoh agama dan elit Islam Politik menjadikan mereka kurang peka dalam melihat dan menyikapi tradisi dan warisan bangsa. Mereka kurang memiliki apresiasi yang memadai atas tradisi bangsa dengan segala pluralitas yang melekat di dalamnya. Atau mereka memaknai tradisi berdasarkan ideologi dan ukuran-ukuran yang mereka buat sendiri tanpa banyak melibatkan masyarakat, atau kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Akibatnya, kekonyolan sering terjadi seiring dengan berkembangnya teologi kekuasaan. Misalnya, praktik-praktik kejahatan tetap marak, dan terkadang berlandung di balik simbol-simbol agama justru daerah di mana teologi kekuasaan itu marak dan dicoba diimplementasikan.

Selain itu, mereka para penganut teologi kekuasaan kurang menghargai tradisi keulamaan yang selama ini melekat pada masyarakat

yang hanya mengundang perebutan, konflik, dan pertentangan bukan hanya antara Muslim dan non-Muslim, tapi antar umat Muslim sendiri. Antara satu aliran dengan aliran yang lain, bahkan antara faksi yang satu dengan faksi yang lain dalam kelompok yang sama. Fakta yang ada di sekeliling kita memperlihatkan dengan jelas kenyataan itu. Irak yang terus bergolak, PKB yang sibuk mengupayakan islah, hanya secuil dari sejumlah tragedi akibat menguatnya teologi kekuasaan yang menghegemoni umat, tepatnya para elit mereka.

sebagian besar mulai terwujud dalam kenyataan. Semua itu dapat dicapai sebagai berkah modernisasi. Namun pada saat yang sama, ia juga membawa malapetaka yang dulu tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam kehidupan.

Melalui modernisasi, yang didukung penuh sains, teknologi, dan ekonomi kapitalistik, bangsa-bangsa Barat menunjukkan kekerasan mereka yang biadab dengan tindak kekerasan kolektif dan sistematis. Mereka di awal masa modern melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa lain di Timur.

Kekerasaan yang mereka lakukan bukan hanya terjadi pada permulaan modernisasi, tapi terus berlangsung sampai saat ini. Misalnya saja, dengan alasan yang sangat sepele, negara-negara Barat modern dapat dengan mudah menggempur negara-negara lain yang terbelakang atau sedang berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai anak modernitas, terkesan –eksplisit atau implisit –mendukung hampir semua kebijakan represif negara-negara Barat tersebut.

Di negara berkembang yang terseret ke dalam modernisasi, wajah yang ditampilkan nyaris tidak berbeda, atau bahkan lebih angker lagi. Dalam hal ini, Indonesia sepanjang tiga puluh empat tahun rezim Orde Baru (Orba) menjadi contoh konkret yang tak terbantahkan. Pada masa itu, rezim penguasa melakukan kebijakan yang sangat otoriter dan represif melalui penyeragaman kehidupan dalam berbagai dimensinya. Setiap suara atau langkah yang berbeda dengan pemerintah dianggap sebagai pembelotan yang harus dibungkam atau dimusnahkan.

Akibatnya, rezim orba –seperti diungkap Pabottingi (2000) –telah membantai paling tidak 500.000 jiwa hanya dalam periode 1965-1966. Tragedi kemanusiaan ini terus berlanjut melalui pembantaian massal di Tanjung Priok, Irian Jaya (Papua), Aceh, Jakarta (peristiwa

spiritualitas sesuai dengan identitas diri kita masing-masing. Kita hendaknya menjadi manusia yang utuh sebagai makhluk yang terdiri dari aspek rasionalitas dan spiritualitas. Kekerasan terjadi, karena kita selama ini berpegang teguh kepada salah satu aspek saja.

Pada satu pihak, keberpegangan kepada rasionalisme semata membuat kita tidak mampu memaknai hidup sehingga kita mengabaikan tujuan hidup yang sebenarnya. Sedang pada pihak lain, pembenaman diri dalam spiritualitas semata membuat kita gagap dan gamang dalam hidup sehingga tidak mampu menyikapi realitas secara arif dan nyata. Maka upaya kita ialah mengembalikan fungsi keduanya sesuai kedudukannya masing-masing, serta pada saat yang sama memadukan secara harmonis kedua unsur itu sehingga terjadi suatu interdependensi yang kokoh.

Melalui usaha tersebut, kita diharapkan menyadari keterbatasan kita. Dengan demikian, kita tidak akan menganggap diri kita selalu benar sendiri, serta akan membuat kita selalu dituntut untuk melakukan dialog secara tulus dengan sesama, dengan lingkungan alam, dan bahkan dengan Tuhan.

重慶米

Terkait dengan itu, terjadinya penurunan kualitas manusia Indonesia, khususnya kekurangan gizi balita, juga akan berdampak sangat jauh terhadap kemungkinan kegagalan Indonesia di masa datang dalam mengembangkan suatu generasi yang *mumpuni* dan terciptanya suatu negara yang kokoh. Akibat kurang gizi, misalnya, akan membuat terjadinya penurunan IQ sebesar 13-15 poin dibandingkan dengan balita normal setelah memasuki usia sekolah. Demikian pula, kekurangan yodium pada anak balita kemungkinan menimbulkan keterbelakangan mental dan penyakit atau gangguan fisik yang lain (lihat IDEA, 2001: 204).

Lahirnya generasi yang kurang memiliki kecerdasan, kreativitas, keterampilan, atau spiritualitas yang memadai itu, selain tidak dapat mendukung sama sekali terhadap harapan pengembangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, hal itu juga akan berdampak terhadap ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk bersaing secara sehat dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Bangsa Indonesia dengan sumber daya manusianya yang lemah itu hampir dapat dipastikan akan berada dalam ketidakberdayaan dalam segala dimensinya dan akan selalu ditundukkan oleh kekuatan-kekuatan semisal hegemoni negara, pasar global dan lainnya.

Jika asumsi ini nantinya benar-benar menjadi kenyataan, maka bangsa ini akan terdampar dalam suatu frustrasi yang cukup mendalam. Dalam ketidakberdayaan dan kekecewaan itu, kekerasan dalam segala bentuknya akan menjadi salah satu fenomena yang dapat merebak kembali dalam kehidupan masyarakat.

Merosotnya kualitas manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang belum sepenuhnya menjadikan masyarakat sebagai subyek yang paling berhak menikmati segala

Dalam kondisi itu, di satu pihak negara harus merepresentasikan kehendak masyarakat yang mengantarkannya kepada kedaulatan yang hakiki; dan di pihak lain, semua orang dituntut untuk bertindak sesuai dengan aturan atau hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat tersebut. Semua itu dilaksanakan dalam kerangka nilai-nilai yang merepresentasikan keadilan, kesetaraan dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang hakiki.

Untuk menghindari terjadinya penyerapan individu ke dalam negara atau menguatnya hegemoni negara terhadap rakyat, pengembangan lembaga-lembaga sosial-keagamaan masyarakat yang kuat menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan. Pada tataran itu, lembaga tersebut memiliki dua fungsi yang kait-mengkait. *Pertama* sebagai *pressure group* yang berperan melakukan semacam kontrol dan penekan yang bersifat moral secara berkelanjutan terhadap negara agar semua kebijakan dan programnya selalu berorientasi dan selalu mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. *Kedua* sebagai lembaga transformatif yang mengemban tugas melakukan penguatan dan pencerahan atas masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pembumian nilai-nilai demokratis, dan moralitas-agama substansial.

Pengembangan sistem politik transformatif semacam itu diharapkan menjadikan negara yang mengejawantah dalam institusi dan konstalasi politik yang dikembangkan pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat memberikan pencerahan dan kesejahteraan atas masyarakat dalam berbagai aspeknya –terutama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan tidak akan membias menjadi proyek yang hanya menebalkan saku para elit dan kelompok yang berada dalam jaringan kekuasaan semata.

Konkretnya, hal itu akan menjadi kegiatan yang benar-benar menyebar rata sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat dalam menyalurkan

aspirasi dan menyelesaikan segala persoalannya diharapkan selalu berpijak pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan selalu mengedepankan keadaban serta moralitas keagamaan luhur yang penuh kearifan.

Terciptanya kondisi dan sistem politik yang kondusif tersebut akan meminggirkan sejauh mungkin segala bentuk kekerasan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula, kondisi seperti itu tidak akan pernah menyuburkan bagi bersemainya politisasi agama dengan karakteristiknya yang radikal, rigid dan (sering) berangasan. Seandainya kekerasan masih muncul, hal itu hanya akan dilakukan oleh petualang-petualang politik yang diyakini tidak akan diterima dan pernah menarik massa dari masyarakat luas.

電車電車

benar-benar mampu memberdayakan mereka dalam kehidupan yang majemuk ini.

Bersamaan dengan itu, agama sebagai bagian fitrah manusia perlu didekati kembali, dipahami, dan diaplikasikan secara utuh. Agama tidak dapat dijadikan sebagai wahana penyelamat manusia di alam eskatalogis semata. Agama perlu dijadikan moralitas kehidupan yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia dari kehancuran dan kebiadaban. Keselamatan akhirat perlu disikapi sebagai konsekuensi logis dari keberagamaan yang dapat menyelamatkan si penganut dan umat manusia lain dari tindakan-tindakan amoral, dan biadab dalam kehidupan dunia. Sikap dan pola pandang semacam itu hendaknya dihadirkan dalam keberagamaan seluruh penganut agama. Dengan demikian, kejujuran akan disikapi sebagai bagian *inherent* agama yang tidak dapat diabaikan sama sekali, serta tidak bisa digadaikan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan sesaat.

INFANTILISME BANGSA

Salah satu kesimpulan dari diskusi panel terbatas Harian *Kompas* pada tanggal 5 Agustus 2003 menyebutkan, partai politik Indonesia saat ini masih menunjukkan wajah yang infantil. Sejatinya, bukan hanya partai politik yang memiliki sifat seperti itu, tapi nyaris seluruh elemen bangsa –para elit, dan sebagian (besar?) masyarakat –berada dalam kondisi tersebut. Bahkan mereka sudah terjebak dalam infantilisme. Memodifikasi konsep Monks *et. al.* (1991: 295) –sikap itu merupakan psikopati yang menyebabkan ketidakmampuan mengadakan hubungan afektif normal dan selalu menjadi problem bagi yang lain.

Salah satu indikator dari fenomena "kekanak-kanakan" itu dapat dilacak pada menguatnya egoisme di tataran negara (baca Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) serta masyarakat yang hanya mau memikirkan diri sendiri. Selain itu, di kalangan masyarakat timbul gejala ketergantungan yang akut terhadap negara. Masyarakat selalu minta "disusui, disuapi", serta dimanja oleh negara. Ketika negara tidak mau menghiraukan mereka, maka mereka lalu *ngambek* yang sering dilampiaskan dalam bentuk tindakan anarkis, kekerasan dan sejenisnya.

Diakui atau tidak, fenomena itu sampai saat ini hampir dapat ditemui di mana-mana, dari tingkat paling bawah sampai jajaran paling tinggi di Republik ini. Karena itu, ungkapan yang menyatakan

bahwa reformasi jalan ditempat, atau bahkan telah mati muda –sampai derajat tertentu –memang sangat beralasan.

Negara Represif

Ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari sikap infantil, serta sulit tumbuh untuk menjadi dewasa berakar pada keberadaan negara yang bersifat integralistik. Dibayang-bayangi oleh bentuk negara seperti itu, Orde Baru (Orba) memetamorfosis menjadi neo-fasisme yang totaliterianistik.

Dhakidae menjelaskan (2003: 745 -747), pada saat itu developmentalisme menjadi anutan yang total. Totalisasi sistemik dalam bentuk formalisasi, birokratisasi, dan militerisasi mendefinisikan bagian atau segala sesuatu di luar lingkaran kecil (kekusaan, aa) sebagai asing jika tidak mampu dan tidak bersedia menerima wacana pembangunan; serta pada saat yang sama mendiskreditkannya sebagai sesuatu yang berada di luar sistem. Penyeragaman total menjadi tak terelakkan yang diberlakukan ke dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa. Demikian pula, monoloyalitas kepada negara yang direpresentasikan oleh aliansi Golkar, dan militer dalam bayang-bayang sang penguasa tunggal menjadi kemestian yang harus dilakukan oleh setiap orang dan elemen bangsa.

Semua itu merupakan manifestasi dari infatilisme yang telah mengungkung rezim Orba. Sikap infantilis menjadikan rezim begitu egoistis sehingga yang ada dalam benak pikirannya hanya dirinya semata. Kekuasaan dan segala yang ada di negeri ini adalah miliknya. Orang atau kelompok lain yang berbeda dianggap asing, serta dianggap tidak memiliki hak sedikit pun menikmati kekayaan Indonesia.

Rezim menjadi begitu ketakutan untuk kehilangan kekuasaannya. Di mana dan kapan saja, rezim Orba menggunakan perlindungan berlapis yang beragam untuk menjaga dan melestarikan kekuasaannya.

pula, agama hendaknya dijadikan sebagai sarana pencerahan sehingga manusia dapat memaknai kehidupan dan mengetahui tujuan kehidupan yang sebenarnya.

Dua upaya ini diharapkan akan mengantarkan proses demokratisasi kepada arti dan tujuannya yang sejati, di mana aura ilahiyah akan memancar ke dalam hati setiap manusia Indonesia. Dengan demikian, manusia sebagai khalifah Tuhan, dan Tuhan sebagai sumber nilai memanifestasikan diri dalam bentuk pencapaian prestasi, berkembangnya tanggung jawab, menyebarnya keadilan, dan kokohnya solidaritas sosial di bumi pertiwi.

Budaya politik itu pula yang membuat sebagian struktur institusi pendidikan kita gemuk dan lamban. Struktur organisasi pada institusi pendidikan sering dirombak dan diperluas bukan karena institusi membutuhkannya. Alih-alih, karena ada orang tertentu yang karena berbagai alasan –seperti tekanan dari atas atau dari bawah –harus diberi posisi dalam institusi tersebut.

Dalam kondisi semacam itu institusi pendidikan kita rasanya sulit, bukan hanya untuk bersaing dengan pendidikan di negara-negara lain, tapi juga untuk menghasilkan manusia berpendidikan dalam arti yang sebenarnya. Fenomena ini tampaknya bukan hanya terjadi pada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga tertentu saja, tapi telah menjadi fenomena pada institusi pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

Sistem Pendidikan Holistik

Persoalan-persoalan semacam itu merupakan prioritas utama yang harus dieliminasi ke depan. Pendidikan perlu didekati dan ditangani berdasar dan berorientasi pada nilai-nilai pendidikan. Jangan lagi ada pendekatan politik kekuasaan yang mengotori dunia pendidikan.

Dalam kerangka itu, kita perlu membangun sistem pendidikan holistik yang segala sisinya, dari kebijakan pengelolaan hingga pengembangan kurikulum serta aplikasinya di dunia nyata, bernuansa pendidikan. Kita perlu mengembangkan kebijakan yang menjadikan segala kepentingan di luar kepentingan pendidikan tidak masuk ke dalamnya. Hal ini sangat urgen untuk segera diagendakan. Tanpa itu, bukan hanya peserta didik yang akan menjadi korban, tapi juga negara, masyarakat dan bangsa Indonesia. ©

KEBERAGAMAAN UMAT DAN SIGNIFIKANSI TEOLOGI KRITIS

Sejauh ini ada kecenderungan di kalangan umat beragama untuk mengembangkan pola keberagamaan yang anti kritik. Keberagamaan sebagai proses penafsiran dan pemahaman umat beragama terhadap agama diidentikkan dengan agama itu sendiri. Pola yang demikian memosisikan mereka sebagai kelompok yang lebih baik, lebih benar atau lebih ortodoks tinimbang kelompok atau dan umat dari agama yang lain.

Kasus Sang Timur yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan salah satu contoh konkret yang memperlihatkan secara telak pola keberagaman semacam itu. Dalam kasus ini, orang atau kelompok dari agama tertentu dengan alasan teologis yang dianut mereka melakukan tindakan sepihak dengan menutup jalan ke arah lembaga pendidikan tersebut. Sebagai dampaknya, siswa mengalami kesulitan untuk masuk ke lokasi.

Melalui tindakan yang merugikan orang dan kelompok lain, mereka nyaris seutuhnya mengklaim diri mereka –eksplisit atau implisit – sebagai *khaira ummah*, kelompok terbaik yang diturunkan dari langit untuk menegakkan kebenaran di bumi persada. Mereka meyakini bahwa segala tindakan mereka, termasuk hal-hal yang merugikan orang dan kelompok lain, sebagai perbuatan yang selalu bernilai baik.

Dalam *Islam, Postmodernism and Other Futures* (2003), Ziauddin Sardar menjelaskan, penarikan Islam sebagai ideologi merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pemandulan misi Islam yang membebaskan. Akibatnya –kata Sardar –*but once Islam, as an ideology, becomes a programme of action of a vested group, it loses its humanity and becomes battlefied where morality, reason and justice are readily sacrificed at the altar of emotions.*

Metamorfosis ini menjadikan Islam kehilangan elan vitalnya sebagai gerakan pencerahan yang bernuansa kemanusiaan universal. Pendukung ideologi ini hanya sibuk meletakkan Islam sebagai landasan untuk membentengi kepentingan kelompok sendiri serta menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Dalam kondisi semacam itu, mereka tidak mau membuka, apalagi mau membangun, suatu ruang untuk dialog, negosiasi, atau pun tawar-menawar. Yang tersisa hanyalah upaya mereka untuk menundukkan kelompok lain dalam hegemoni mereka.

Para ideolog meletakkan Islam sebagai saingan terhadap ideologi-ideologi lain. Dengan demikian, mereka menyikapi kehidupan sebagai sebuah pertarungan terus-menerus dalam rangka memperebutkan ruang publik. Realitas yang ada dihadapan mereka disikapi sebagai wacana kalah-menang dan sebagai praksis yang menundukkan atau ditundukkan. Tujuan dari semua “perjuangan” mereka adalah kemenangan mutlak dan kemampuan menundukkan orang atau kelompok lain.

Dalam proses kontestasi yang terus berlangsung itu, dimensi moral menjadi terabaikan. Nilai-nilai kemanusiaan perennial yang melekat pada ajaran agama menjadi tak tersentuh dan terbenam dalam debu-debu sejarah yang kian menebal dari saat ke saat. Kesetaraan, misalnya, sebagai etika sosial keagamaan dan kemanusiaan perennial disikapi sebagai sesuatu yang heretik; dan karena itu harus dibuang

Dengan menganut Islam, umpamanya, serta menjalankan kewajiban ritualistik, mereka beranggapan telah menjadi bagian dari *khaira ummah*, umat terbaik sebagaimana dinyatakan teks suci. Mereka tidak menyadari bahwa signifikansi ritual terletak pada keberadaannya sebagai simbol bagi kepatuhan seseorang untuk menjalankan ajaran-ajaran substantif agama yang sejatinya bersifat moral. Dengan demikian, ketika seseorang atau komunitas tertentu menyatakan kesiapan untuk menjalankan ritual agama, pada saat yang sama mereka dituntut untuk menjalankan pesan-pesan moral yang ada di balik ritual tersebut secara khusus, dan moralitas keagamaan secara umum.

Pencapaian keberagamaan ini berjalan seiring dengan kesungguhan umat Islam dan umat beragama secara umum untuk menjadikan keberagamaan mereka sebagai proses merengkuh misi universal agama. Umat Islam perlu menyadari bahwa dengan sekadar menjadi umat Islam tidak secara otomatis mereka memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan orang, kelompok lain, atau manusia yang tidak beragama. Mereka dapat mencapai *khaira umah* manakala mereka mampu mengemban misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin* semisal nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas di antara sesama umat manusia.

Untuk mengetahui posisi mereka dalam mengembangkan misi itu, mereka perlu merekonstruksi teologi keberagamaan mereka dari sifatnya yang apologetik dan cenderung berbentuk justifikasi menjadi teologi kritis yang dapat menelanjangi keberagamaan mereka secara obyektif berdasarkan dimensi holistisitas internal ajaran agama dan kehidupan mereka, serta dimensi eksternal kehidupan global. Mereka dituntut untuk menjadikan agama sebagai kritik diri yang dapat membeberkan kelemahan (bahkan borok dan kebejatan) sikap dan perilaku mereka di hadapan sesama manusia dan dalam altar kehidupan dengan segala seluk beluknya.

Mereka perlu menyadari, sebagai agama fithrah, Islam akan selalu sesuai dan bernilai positif bagi seluruh umat manusia dan kehidupan. Karena itu, selama sepak terjang mereka belum memberikan sumbangan positif terhadap perbaikan kehidupan, berarti keberagamaan mereka belum menyentuh esensi keberagamaan hakiki. Pada sisi itu reformulasi keberagamaan menjadi bagian yang tidak mungkin dihindari untuk terus dikembangkan sehingga mereka dapat menyentuh misi agama sedekat mungkin. ©

DARI KONFLIK MENUJU DIALOG YANG DIALOGIS

Di negeri ini pertentangan atau konflik horizontal maupun vertikal yang bermula dari perbedaan pandangan terus berkelanjutan sampai sekarang. Dalam bentuk yang horizontal, pertentangan itu di antaranya dapat dilacak pada konflik antarelite yang selalu menjadikan perbedaan sebagai ajang konflik terbuka. Misalnya, hampir semua pernyataan atau tindakan eksekutif ditanggapi negatif oleh pihak legislatif – DPR dan MPR, mulai dari pemecatan Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi, sampai persoalan penangkapan Guterres. Sedang dalam bentuk vertikal, pertentangan itu dapat dilihat pada penentangan (sebagian) masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah, misalnya tentang kenaikan BBM, penurunan bendera Bintang Kejora di Wamena oleh aparat keamanan, atau lainnya.

Terlepas siapa yang memicu persoalan, adanya perbedaan sudut pandang seharusnya tidak perlu sampai mengarah kepada konflik, apalagi sampai berlarut-larut. Idealnya, perbedaan sudut pandang seharusnya diletakkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara sehingga hal itu bisa memperkaya wawasan dalam penyelesaian masalah bangsa secara keseluruhan. Namun dalam realitasnya, perbedaan pandangan sering mengarah kepada konflik terbuka, yang pada gilirannya menyulitkan mereka yang terlibat konflik dalam menentukan langkah positif untuk menuju masa depan yang penuh kebersamaan.

Dilihat dari aspek mana pun, pertentangan horizontal antar elit bukan hanya akan menghambat proses penyelesaian krisis yang belum sepenuhnya pulih melanda negeri ini, tapi juga akan memiliki *trickle down effect* dalam bentuknya yang negatif, menetes, merambat ke masyarakat luas dalam bentuk konflik yang lebih tajam dan luas. Di tingkat bawah, pertentangan itu membiaskan proses dan nilai-nilai demokrasi ke arah berkembangnya otoritarianisme atau tindakan-tindakan tidak sehat lain yang tentunya akan merugikan segala pihak; mereka yang terlibat konflik, masyarakat luas, dan bangsa secara keseluruhan. Pada sisi ini pula pertentangan vertikal antara pemerintah, atau dan lembaga-lembaga tinggi negara pada satu pihak, dan masyarakat pada pihak lain memiliki dampak negatif yang kurang lebih sama.

Dalam konteks itu, dialog sebenarnya merupakan salah satu sarana dengan tingkat signifikansi cukup tinggi untuk meredam konflik dan menjadikan perbedaan sebagai pengkayaan pandangan dalam merumuskan solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi bangsa. Karena itu, adanya Sidang Tahunan MPR, pertemuan berkala antara eksekutif dan legislatif, gerakan rekonsiliasi, ataupun dialog dalam bentuk-bentuk yang lain merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya peredaman konflik yang berkepanjangan, serta pada gilirannya dapat menumbuhkan gagasan-gagasan segar bagi langkah-langkah konkret penyelesaian persoalan bangsa.

Namun sejauh ini, agenda tersebut ternyata tidak mampu memberikan angin segar sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, dialog yang terjadi justru mengarah kepada pembentukan konflik berikutnya. Di sini jelas ada yang salah – minimal ada yang kurang tepat – dalam pelaksanaan dialog yang dikembangkan selama ini, dan karena itu perlu direformulasi sehingga sesuai dan nilai dan tujuan dialog yang hakiki.

Dengan demikian, dialektika terlalu mengagungkan "kebenaran" semata, khususnya kebenaran rasional. Padahal dengan hanya menunjukkan kebenaran, sebuah peperangan (pertikaian, pertentangan dan sebagainya, pen.) tidak akan pernah bisa dihindarkan. Atas dasar itu, diperlukan pola dialog yang lebih dari sekadar bersifat dialektis. Bukan berarti dialektika salah. Bagaimapun juga manusia adalah makhluk rasional, dan rasionalitas adalah bakatnya yang paling berharga.

Namun yang perlu disadari, rasionalitas bukanlah satu-satunya realitas bagi manusia. Selain kebenaran, perlu diperlukan aspek lain yang tidak terdapat pada dialektika, yaitu cinta. Jelasnya, dialog yang perlu dikembangkan antar sesama manusia ialah dialog yang dialogis; suatu dialog mengenai subyek-subyek, bukan obyek sehingga benar-benar otentik dan mendalam. Mereka berdialog bukan mengenai sesuatu, tetapi mereka melakukan dialog mengenai diri mereka sendiri; mereka mendialogkan diri sendiri.

Dalam kenyataannya, pertikaian memang tidak dapat dihentikan atau diselesaikan melalui dialog tentang kebenaran semata. Dari sejarah kita belajar, banyak orang atau kelompok bertikai, bahkan berperang justru untuk mempertahankan atau menyebarkan paham, ideologi atau semacamnya yang dalam anggapan mereka merupakan suatu "kebenaran". Karena itu Pannikar mengingatkan, dialog dialektis dapat menjadi alat untuk menguasai dan alat dari kehendak untuk menguasai. Jelasnya, melalui rasionalitas, suatu kebenaran sering dipaksakan untuk bisa diterima oleh pihak lain.

Ketika pihak lain tidak mau menerima kebenaran karena ia juga memiliki kebenaran sendiri dengan dalil-dalil yang juga rasional, maka yang tersisa adalah terjadinya dua sikap atau pandangan yang saling bertabrakan yang sulit dipertemukan lagi. Dalam kondisi ini adanya konflik menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar untuk muncul ke permukaan.

dan kelangsungan hidup bangsa sehingga keyakinan atau kebenaran mereka dapat dipertemukan dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian diharapkan di sana akan ditemui nilai-nilai, latar belakang dan tujuan yang sebenarnya dari gagasan atau tindakan yang selama ini membuat mereka terlibat dalam perbedaan, atau bahkan mengarah kepada pertentangan. Pada sisi ini, persoalan lalu akan menjadi milik bersama yang akan diselesaikan secara bersama-sama. Mereka – eksekutif dan legislatif, eksekutif dan masyarakat, atau dan sebagainya – benar-benar berjumpa dalam bingkai kemanusiaan sejati. ©

SIGNIFIKANSI PERINGATAN MAULID

Beberapa waktu lalu sebagian umat Islam sempat dibuat *geger* dan marah ketika Rasulullah dikarikaturkan sebagai teroris. Unjuk rasa marak di mana-mana memprotes ulah nakal yang dianggap melecehkan agama ini.

Persoalan yang kemudian mengedepan terletak pada penyikapan umat Islam yang tampaknya hanya sebatas marah, protes, dan bahkan sebagian cenderung mengarah kepada tindakan destruktif. Unjuk rasa tentu wajar sebaga ejewantah aspirasi mereka selama mereka melakukannya dengan cara-cara damai. Namun jika hal itu sudah mengarah kepada anarkisme, persoalannya menjadi lain. Demikian pula jika umat Islam sekadar sibuk dengan sebatas protes tanpa ada kearifan untuk membuat agenda strategis ke depan, maka mereka tidak akan menggapai keuntungan apa-apa. Justru bisa-bisa mereka hanya akan menelan kerugian.

Refleksi Diri

Ada beberapa kemungkinan yang mendasari munculnya karikatur yang mengolok-olok simbol agama Islam tersebut. *Pertama*, kesengajaan kelompok tertentu untuk memancing kemarahan umat Islam sehingga umat Islam dari saat ke saat sibuk dengan sikap reaktif, dan lupa terhadap persoalan dasar yang dihadapi mereka. *Kedua*, ketidaktahuan

Di bawah kepemimpinan Rasulullah dan para khalifah awal yang meneruskannya umat Islam berkembang secara relatif (untuk ukuran zamannya) sebagai –meminjam penjelasan Barry Knight *et. al.* (2002) – *good society*; suatu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka yang bersifat ekonomi, fisik, dan keamanan, dapat mengembangkan asosiasi di antara mereka, dan bisa berpartisipasi (aktif) dalam mengurus masyarakat.

Umat Islam dituntut untuk meladani Rasulullah melalui pendekatan semiotis-hermeneutik. Mereka niscaya untuk menguak substansi nilai yang dikembangkan Nabi dan inti tindakan yang dilakukannya. Nilai dan tindakan itu kemudian dikontekstualisasikan ke dalam kondisi kekinian dengan pola dan bentuk yang bisa berbeda. Pada saat yang sama, umat Islam perlu mengembangkan dialog keterbukaan yang lebih intens dan tulus dengan dunia Barat sehingga prakonsepsi dan sikap apriori yang masih ada pada masing-masing dapat dihilangkan, dan kesepahaman serta *mutual-respect* dibangun dengan kokoh.

Dalam kerangka itu terletak signifiknasi peringatan Maulid Rasulullah Muhammad (saw) yang tahun ini jatuh pada hari Selasa, 11 April. Kita perlu menjadikan peringatan Maulid dan peringatan keagamaan lain sebagai wahana reflektif untuk pengkayaan spiritual, peningkatan kecerdasan emosional dan untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan. Dengan demikian, peringatan maulid Nabi dan sejenisnya tidak akan terjebak ke dalam acara seremonial yang terus berulang tanpa berimplikasi pada terjadinya perubahan fundamental bagi keberagaman umat. ©

SIGNIFIKANSI ISRA' MI'RAJ DALAM KONTEKS KEKINIAN

Pada setiap tanggal 27 bulan Rajab dalam hitungan tahun qamariyah (*lunar year*), yang kali ini bertepatan dengan tanggal 24 September 2003, umat Islam, terutama di Indonesia, biasa memperingati peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah (saw). Kehidupan bangsa Indonesia memang lekat dengan upacara dan tradisi keagamaan. Setiap peristiwa yang berkaitan dengan agama nyaris tidak pernah terlewatkan; semuanya pasti diperingati secara seremonial.

Fenomena itu menjadi salah satu faktor adanya anggapan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dikenal sebagai bangsa yang taat beragama. Tepatnya, selain mereka antusias menyambut hari-hari yang berkaitan dengan keagamaan –termasuk peristiwa Isra' Mi'raj – melalui pelaksanaan acara-acara yang cukup meriah dan besar-besaran, mereka juga sangat patuh menjalankan ritual formal dan tradisi-tradisi keagamaan yang lain. Misalnya, setiap Jumat atau Minggu, mesjid dan gereja dipenuhi oleh umat agama masing-masing untuk melakukan serangkaian ibadah, misa dan sejenisnya.

Namun ironisnya, pada saat yang sama agama terkesan hanya dijadikan alat pengentalan identitas diri. Bahkan ada kecenderungan sebagian kelompok tertentu menjadikan agama sebagai alat pencapaian kepentingan kelompok mereka yang sempit dan sesaat. Agama

tujuan politik mereka yang sangat pragmatis, sekadar meraih suara sebanyak mungkin. Hal itu membuat mereka sangat sulit untuk mengembangkan dialog transformatif dengan masyarakat dan realita konkret Indonesia. Alih-alih, mereka membodohi, dan berupaya menundukkan masyarakat ke dalam kepentingan sendiri dan kelompok mereka.

Dalam kondisi Indonesia yang kritis itu, mudah-mudahan peringatan Isra' Mi'raj mampu menciptakan kembali suasana dialogis di kalangan umat Islam, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam suasana itu, mereka diharapkan dapat berdialog pertama kali dengan diri sendiri, mengasah nurani sehingga berkembang kecenderungan kepada nilai-nilai keagamaan substansial, semacam kesetaraan dan solidaritas sosial yang dapat mengantarkan kepada dialog dengan realita dan masyarakat luas.

Pada akhirnya, dialog dengan Tuhan diharapkan juga tumbuh subur pada bangsa ini sehingga mereka menyadari bahwa "akhirat" merupakan realitas riil yang ada di hadapan mereka; suatu kesadaran moral-teologis untuk mempertanggung-jawabkan keseluruhan tindakan kita kepada Tuhan, kehidupan dan sesama manusia. Dalam kondisi yang tercerahkan itu, pluralisme yang berwujud dalam sikap saling-menghargai, pengembangan kesetaraan, solidaritas dan keadilan sosial, serta sejenisnya akan berpijak kokoh di masyarakat luas.

tempat tinggal mereka karena rumah mereka telah diratakan dengan tanah oleh aparat. Kesedihan mereka ternyata belum selesai karena beberapa hari kemudian (tanggal 26/10 2003) tenda-tenda darurat yang mereka bangun telah dibakar oleh sekelompok orang.

Orang-orang semacam warga Kampung Sawah itu tentunya tidak sempat lagi memikirkan untuk berlebaran atau berhari raya, seperti membeli pakaian dan seumpamanya. Yang ada dalam benak mereka hanyalah mencari cara untuk bertahan hidup; melindungi diri mereka dari panas matahari dan dinginnya hujan, serta mendapatkan sesuap nasi untuk menyambung hidup mereka yang sekarat. Kenyataan hidup seperti itu adalah persoalan yang harus mereka hadapi sampai saat ini, ketika saat-saat kewajiban puasa akan usai, dan hari raya kian mendekat.

Fenomena di atas menampakkan secara nyata dua kenyataan yang sangat kontras dan bertentangan. Bulan puasa yang pada intinya sebagai asah nurani dan penajaman sikap dan perilaku sosial belum mampu menjadikan sebagian (besar?) masyarakat untuk menciptakan kerja-kerja kreatif dan sistematis yang dapat mengangkat kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari lembah penderitaan. Bahkan jika kita mau jujur, para elit dan kelompok *the haves* hanya bersibuk diri dengan hal-hal yang bersifat karitas murni yang tidak memiliki dampak apa pun terhadap masa depan kelompok yang terpinggirkan.

Dalam melakukan itu, orang yang mempunyai kian memperkokoh eksistensi mereka sebagai kelompok kelas atas dan menempatkan masyarakat miskin sebagai kelompok yang benar-benar tercampakkan. Karitas dalam bentuk "*memberi ikan dan bukan kail*" hanya menambah kesenjangan antara orang yang punya dan orang yang miskin kian melebar tajam.

Paparan di atas mengentalkan kebenaran Hadis Nabi yang menyatakan bahwa banyak orang berpuasa yang puasanya tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap mereka. Mereka hanya merasakan haus dan lapar, tapi sikap dan perilaku mereka tidak mengalami proses transformasi sedikit pun. Mereka berpuasa, namun mereka tetap melakukan kejahatan dan hal-hal munkarat lain, seperti praktik korupsi, dan tidak peduli atas penderitaan orang lain.

Sejatinya puasa merupakan upaya refleksi total terhadap seluruh sikap, perilaku, dan atau aktivitas diri orang yang melakukan ibadah itu. Kewajiban untuk menahan diri bukan hanya terhadap segala hal yang dilarang, tapi juga terhadap sebagian hal yang pada hari-hari biasa (di luar bulan puasa) dibolehkan menjadi bukti jelas tentang keharusan umat Islam untuk melakukan transformasi diri mereka secara menyeluruh.

Melalui pengendalian diri, mereka diharapkan dapat mengasah nurani sehingga spiritualitas mereka memiliki ketajaman, yang dalam Islam disebut etika-moral takwa; sikap kehati-hatian untuk selalu berada dalam nilai-nilai dan ajaran moral luhur agama. Dengan demikian, mereka mampu menguak arti kehidupan yang hakiki dan tujuan kehidupan yang sejati.

Dalam perspektif Islam, kebersamaan merupakan makna hidup yang sejati. Karena itu, setiap individu (menurut Eaton 2002: 505) harus menjadikan orang lain tak ubahnya diri sendiri dan harus diperlakukan seperti itu. Artinya, jika orang lain merasa tidak betah hidup dalam penderitaan, maka setiap muslim seharusnya mampu berempati, dan mencari solusi sistematis untuk melepaskan orang-orang yang menderita itu dari jeratan penderitaan.

Pencapaian kebersamaan meniscayakan umat Islam untuk menancapkan secara kokoh pola pandang tentang kesederajatan di antara sesama umat manusia. Dalam bahasa Fazlur Rahman (1987:

125), Al-Quran mengajak manusia menerima Tuhan Yang Mahaesa dan menerima kemanusiaan yang tunggal sebagai dua hal yang saling berkaitan, yang tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Hanya melalui keyakinan teologis semacam itu, kebersamaan, dan solidaritas sosial dalam kerangka kesederajatan dapat berpijak kuat pada pandangan dan hidup keseharian umat Islam.

Pembumihan kesederajatan dalam sikap dan perilaku umat Islam khususnya, dan umat manusia secara umum, tidak dapat dilepaskan dari keadilan, dan kejujuran. Keadilan menjadi nilai moral paling asasi yang sama sekali tidak dapat diabaikan untuk dilabuhkan dalam kehidupan. Tanpa adanya keadilan, kesederajatan tidak akan pernah berkembang subur dalam kehidupan. Pada saat yang sama, pencapaian keadilan hanya akan menjadi angan-angan yang sia-sia jika tidak disertai dengan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui kesalahan diri sendiri, dan kejujuran untuk menerima kebenaran orang lain hatta orang lain itu orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak pernah tersentuh pendidikan, atau orang yang selama ini dianggap sebagai sampah masyarakat.

● ● ●

Berangkat dari inti berpuasa itu, umat Islam –terutama di Indonesia yang saat ini kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih cukup tajam –seharusnya mampu mengembangkan puasa mereka sebagai upaya untuk "hidup bersama" dengan kelompok marginal yang sampai saat ini belum disentuh proses *community empowering* secara sistematis dan berjangkauan jauh ke depan. Hidup bersama mengindikasikan sikap empati, komitmen, peduli, dan terlibat aktif dalam persoalan yang dihadapi kelompok *mustadh'afin* dalam bentuk pencarian solusi transformatif yang dapat memberdayakan mereka dalam arti yang senyatanya.

diletakkan di atas landasan moral dengan cara mengedepankan *civility* serta menjauhkan diri dari segala tindakan yang biadab dan anarkis.

Jika kita mau jujur, sepanjang masa orde baru sampai kini masyarakat semacam itu masih terasa (agak) absen dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Akibatnya, selama orde baru masyarakat tidak memiliki kemandirian. Masyarakat terkooptasi oleh negara dan tidak memiliki tawar menawar yang tinggi dalam melaksanakan kehidupan mereka. Ketika datang era reformasi, masyarakat terperangkap dalam pola ekstrem yang lain. Dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya, masyarakat (termasuk komunitas Muslim) cenderung mengedepankan tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan semacamnya sehingga tidak bernilai positif bagi kehidupan mereka sendiri. Bahkan kekerasan, tindakan teror, perbuatan anarkis terus berlanjut sampai saat ini.

Dilihat dari perspektif manapun, kekerasan dan seumpamanya selain bertentangan dengan ajaran Islam, pola itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Pola semacam itu juga tidak akan mengantarkan umat (dan masyarakat luas) kepada kedewasaan. Selama mereka tidak dewasa, maka selama itu pula mereka akan terus digilas oleh zaman dan perubahan yang terus terjadi. Mereka tidak akan pernah berada setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam skala internasional.

Atas dasar itu, upaya pemahaman kembali nilai-nilai puasa secara utuh, dan sekaligus membukumkannya dalam kehidupan konkret merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Melalui upaya itu, mereka diharapkan dapat merealisasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan nyata sehingga berdampak positif bagi umat Islam sendiri, umat

dapat menyumbangkan peran cukup berarti dalam mengembalikan bangsa kepada fitrah kemanusiaannya yang fitri.

Kenyataan itu menggugah kita untuk membaca kembali makna halal bihalal dan meletakkannya dalam konteks dan kondisi bangsa dalam kekinian. Upaya ini perlu dilakukan agar kegiatan tersebut memiliki arti yang signifikan dalam mendukung pengembangan kehidupan yang lebih mencerminkan nilai-nilai keagamaan sejati dan kemanusiaan sejati sebagaimana menjadi harapan bangsa secara keseluruhan.

Sejak awal, halal bihalal merupakan kegiatan yang memiliki mata rantai yang terkait erat dengan Idul Fitri. Kegiatan pasca lebaran ini senyatanya berada dalam bingkai yang kukuh yang menyatu dengan kegiatan Idul Fitri sebagai puncak keberhasilan umat dalam menunaikan puasa sebagai proses pengendalian diri. Moment tersebut merepresentasikan semangat Islam dalam bentuk munculnya kesadaran di kalangan umatnya untuk selalu mengendalikan diri dari segala sikap dan tindak kejahatan, serta kesiapan untuk meminta dan sekaligus memberikan kepemaafan kepada orang atau pihak lain.

Kesadaran semacam itu merupakan salah satu jalan yang akan mengantarkan umat Islam mendapatkan kembali kemanusiaan mereka yang fithri. Pencapaian derajat ini mengindikasikan bahwa mereka telah memperoleh kemenangan sebagai hamba Tuhan yang berhasil menundukkan segala bentuk dorongan, sikap dan perilaku jahat yang ada dalam hati mereka.

Pada saat yang sama, hal itu menunjukkan bahwa mereka telah mampu mengembangkan segala hal yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas perennial, seperti solidaritas sosial, dan

cinta damai. Dengan adanya kemampuan itu, ungkapan semacam "*minal 'aidzin wal faizin*" atau dan "*mohon maaf lahir dan batin*" yang mereka sebarakan menjelang dan saat-saat hari raya akan menemukan bentuknya dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai yang terdapat pada Idul Fitri dan kemudian dikonkretkan dalam tradisi halal bihalal tersebut adalah suatu moralitas keagamaan yang agung. Secara prinsip, moralitas atau etika –menurut P. Edwards (1998: 41) adalah *standards of behaviour* yang memberikan otoritas untuk menilai suatu sikap dipuji atau dicela, dan dihormati atau dihina. Moralitas yang baik dan agung adalah substansi dan nilai yang menjadikan setiap sikap dan perilaku memiliki makna dan tujuan.

Kehidupan bermoral adalah kehidupan yang mempunyai makna bagi diri sendiri, manusia yang lain, dan alam semesta; serta sekaligus memiliki tujuan penyebaran kebaikan bagi semua penghuni alam semesta. Maka, moralitas identik dengan setiap nilai yang menjadi dasar bagi sikap dan perilaku yang dapat mengukuhkan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Sebab melalui nilai-nilai itu, setiap sikap dan perilaku manusia akan selalu diarahkan kepada kebaikan bagi semua dan akan bernilai positif bagi terciptanya suatu kehidupan yang sesuai dengan fitrah kehidupan dan cita-cita seluruh umat manusia.

Pengendalian diri, silaturahmi, dan kepedaafan menjadi inti dari moralitas agama karena hal itu akan membuat seseorang selalu berupaya memadamkan dendam-kebencian, dan menggantinya dengan cinta dan kasih dan sikap yang sejenis kepada yang lain. Sikap itu pula akan membuat umat manusia bersikap toleran terhadap perbedaan dan mau menghargai pihak yang lain. Demikian pula, sikap tersebut akan membuat manusia selalu bersikap obyektif dalam melakukan intraksi dengan sesamanya sehingga akan selalu mengedepankan keadilan, kearifan, dan kebijakan.

kepada semua makhluk sehingga Rasul disayangi oleh semua. Hal ini menunjukkan bahwa misi Islam –sebagaimana direpresentasikan Nabi Muhammad (saw) – adalah mengembangkan dan melanggengkan kedamaian.

Dalam perspektif tersebut, halal bihalal harus dijadikan salah satu momentum penting dalam penyebaran misi itu. Meminjam ungkapan Bell (1997: 264), ritual keagamaan seharusnya dilihat sebagai sarana untuk menciptakan dan memperbaiki komunitas, sebagai transformasi identitas kemanusiaan (bukan identitas kelompok, pen.), dan untuk menciptakan kembali arti keberadaan eksistensial manusia (*existensial sense of being*) dalam kosmos ini.

Alhasil, halal bihalal hendaknya dikembangkan sebagai suatu kegiatan yang merujuk kepada kesadaran humanistik dan nilai-nilai keagamaan yang pada intinya terletak pada misi pengembangan kehidupan yang bermoral –Islam sebagai kebenaran; Islam sebagai agama perdamaian. Selanjutnya, wujud konkret moralitas tersebut harus ditumbuh-kembangkan dan dilestarikan dalam sepanjang kehidupan mereka pasca kegiatan tersebut. Mereka tidak bisa hanya menjadikannya sekadar sebagai suatu formalisme yang menjadikan mereka terperangkap dalam sebatas kegiatan tersebut yang kemudian memudar selepas acara usai. Justru kegiatan tersebut perlu dijadikan awal dari proses rekonsiliasi hakiki dan perdamaian yang langgeng.©

Persoalannya, nilai-nilai itu pada umumnya akan pudar kembali manakala mereka kembali ke kota. Mudik lalu tidak meninggalkan apa-apa selain keletihan, atau bahkan pemborosan dalam segala dimensinya. Bahkan ada kecenderungan, mudik bukan lagi menjadi perjalanan spiritual transformatif yang dapat mencerahkan, menyegarkan kehidupan mereka yang layu. Alih-alih, mudik dijadikan ajang pamer kehidupan yang berdimensi sosial-ekonomi. Sebagian mereka pulang kampung sekadar untuk mempertontonkan kemewahan, atau pola hidup konsumtif sebagai bukti keberhasilan hidup mereka di kota.

Kondisi semacam ini pada gilirannya membuat sebagian pemudik harus hidup dengan kepura-puraan. Agar dikatakan berhasil, mereka harus pamer mobil yang sejatinya sewaan. Mereka membagi-bagikan uang dan hadiah lainnya pada sanak keluarga, tanpa harus tahu lagi apa yang akan dijadikan modal sekembali mereka ke kota. Mudik lalu tidak memberikan makna apa pun selain tradisi yang di dalamnya penuh dengan hipokrisi dan kehidupan semu yang kian menggerus nilai-nilai moral yang selama ini telah mengalami degradasi cukup parah.

Fenomena semacam itu yang seharusnya perlu dikritisi bersama. Mudik perlu dikembalikan kepada makna dan tujuannya yang sarat dengan nilai-nilai keluhuran. Spiritualitas yang sejatinya intrinsik dalam mudik perlu dikais kembali, diangkat dan direkonstruksi, serta diinternalisasi menjadi salah satu dasar rujukan dalam membangun kehidupan yang penuh silaturahmi, dan lebih akrab dengan kehidupan alam. Untuk itu, kita harus meninggalkan sikap kepura-puraan, dan suka pamrih, dan menggantikannya dengan ketulusan dan kejujuran. Mari kita mulai. ©

meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Mahaesa, bersifat mutlak, dan transendental (*tauhid rububiyah*). Keyakinan seperti itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang selain Allah adalah merupakan makhluk yang tidak memiliki hak sedikit pun untuk diperlakukan sebagai Tuhan atau disikapi seperti Tuhan. Pada saat yang sama itu, hal itu juga menggambarkan tentang ketidakbolehan manusia untuk diperlakukan semena-mena atau direndahkan karena manusia di hadapan Tuhan adalah sederajat.

Sebagai implikasi logis dari hal itu adalah munculnya tauhid sebagai nilai moral transformatif dalam kehidupan sosial. Ketauhidan Islam adalah akidah yang menumbuhkan moralitas pembebasan manusia. Dengan demikian, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara ide monoteisme pada satu pihak, dan pengembangan moral kemanusiaan universal pada pihak yang lain. Kedua aspek itu merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Surat al-Mâ'ûn (107) telah menggambarannya secara konkret nilai-nilai tersebut. Surat ini mengungkapkan dengan jelas bahwa orang yang tidak memiliki solidaritas sosial, dan nilai-nilai yang semacam itu adalah memiliki posisi yang sama seperti orang yang mendustakan agama.

Khotbah Haji Wada' (dan ibadah haji mesti berlabuh dalam Idul Adha) yang disampaikan Rasulullah (saw) mengukuhkan hubungan tersebut. Dalam ibadah haji tersebut, Nabi menyatakan tentang keharusan manusia untuk menjaga hak dan kehormatan orang lain, serta memperlakukan manusia yang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Menurut Rahman (1979: 25), khotbah Nabi pada kesempatan itu merepresentasikan tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi intisari perkembangan yang mendasari gerakan Islam dalam kemajuannya yang aktual dan tujuan yang ingin dicapainya. Prinsip tersebut adalah humanitarianisme, egalitarianisme, keadilan sosial dan ekonomi, kebajikan, serta solidaritas sosial.

yang sangat luas. Pengorbanan merepresentasikan upaya pencapaian nilai-nilai kebaikan sejati yang pada prinsipnya bersifat moralitas perennial dan universal, seperti melepaskan egoisme, narsisme, dan sejenisnya, berlaku adil kepada siapa saja, dan mengembangkan kesederajatan dalam kehidupan.

Melalui pemaknaan semacam itu, Idul Adha akan bersifat signifikan dalam meneguhkan keberagamaan yang substansial; kebertauhidan yang berimplikasi secara nyata dalam kehidupan. Hari Raya Haji mengingatkan kita tentang peristiwa keagamaan yang telah menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang berawal dari penghambaan diri manusia kepada kepentingan diri sendiri. Karena itu, Idul Qurban harus menjadi proses pembebasan manusia dari segala sifat-sifat yang akan membuat umat manusia lupa tentang jati dirinya sebagai makhluk Allah, yang satu dengan yang lain memiliki kesetaraan dan kesederajatan, serta juga perbedaan yang tidak harus dipertentangkan. Dalam kesetaraan dan perbedaan itu seluruh umat manusia seharusnya menjalin kerjasama yang hakiki, serta membuang jauh-jauh segala bentuk permusuhan, serta segala rupa kejahatan yang lain. ©

kepada aspek yang bersifat kognitif dan afektif, apalagi yang bersifat konatif.

Pola pendidikan agama seperti itu telah menjadikan manusia "terasing" dengan agamanya, dan bahkan dengan kehidupan itu sendiri. Mereka mengenal agama sebagai persoalan yang hanya penuh dengan klaim-klaim kebenaran sepihak. Mereka terperangkap pada pemahaman ajaran agama yang bersifat permukaan, dan bersifat legal-formalistik yang hanya berkaitan dengan persoalan halal-haram, iman-kafir, surga-neraka, dan persoalan-persoalan lain yang seumpama dengan itu. Sedang ajaran dasar agama yang sarat dengan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, semisal kedamaian dan keadilan, menjadi terbengkalai, dan tidak pernah disentuh secara serius.

Akibatnya, pesan dan misi agama yang bersifat perennial terbenam di balik keberagamaan eksklusif. Teks-teks suci dibaca tiap hari, namun maknanya yang hakiki tidak berwujud dalam kehidupan. Kedamaian hidup, keadilan, persamaan kemanusiaan, dan nilai-nilai sejenis yang menjadi risalah agama-agama besar tidak lagi menjadi komitmen umat beragama.

Sebaliknya, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama merebak di mana-mana. Kezaliman, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ironisnya, kejahatan hidup berdampingan secara akrab dengan bentuk-bentuk keagamaan formal. Seseorang yang rajin melakukan ritual keagamaan tidak mustahil sebagai koruptor kelas kakap yang merugikan jutaan manusia yang lain. Demikian pula, seorang yang dianggap "tokoh agama" bisa jadi sebagai "pembunuh" berdarah dingin yang dengan ringannya menghabisi jiwa orang lain, justeru dengan menggunakan

nama "agama". Mereka bisa membunuh manusia lain dengan dalih perang suci dengan tanpa perasaan berdosa sedikit pun.

Semua itu—sampai batas tertentu—merupakan produk dari pendidikan agama formal yang selama ini berjalan di tanah air ini, dan tidak menutup kemungkinan terjadi pula di beberapa kawasan dunia yang lain. Pada sisi itu, jika kemanusiaan dan kehidupan masih merupakan komitmen bersama, maka rekonstruksi pendidikan agama menjadi kemestian yang perlu menjadi perhatian dari segenap kalangan; para agamawan, tokoh intelektual, dan kaum pendidik.

Untuk merekonstruksi pendidikan agama, pertama kali yang perlu dilakukan adalah telaah kritis dan menyeluruh terhadap agama, baik dalam bentuknya yang normatif maupun yang historis. Teks-teks suci yang bersifat normatif perlu dipahami secara utuh sehingga nilai-nilai dasar agama dapat ditangkap secara keseluruhan. Sedang dalam sisi historis, pemahaman umat terhadap agama sepanjang sejarahnya perlu diperiksa kembali.

Dalam perspektif Islam—sebagaimana diungkapkan Fazlur Rahman (1992)—tugas pertama yang amat penting adalah memeriksa kembali tradisi Islam yang tentunya berisi banyak hal yang islami, yang tidak islami, dan yang terdapat di antara batas keduanya. Sebagai contoh, pandangan yang bersifat eksklusif yang tidak sesuai dengan fitrah manusia perlu dipahami sebagai tradisi yang tidak sesuai dengan nilai agama. Melalui pembacaan kembali tersebut, tradisi—khususnya berupa pemahaman umat terhadap agama mereka dari masa ke masa—perlu dirumuskan dan diletakkan kembali dalam kerangka dasar ajaran agama yang bersifat universal sehingga bersifat dinamis, responsif, dan transformatif dalam kehidupan.

Pada gilirannya, pemahaman terhadap agama-agama lain akan menimbulkan keberagamaan yang inklusif dan pluralis. Para pemeluk agama akan mengerti dan menghormati perbedaan yang terdapat pada agama yang lain serta menjadikan perbedaan itu sebagai pengkayaan wawasan dan intelektual untuk membangun kerjasama yang kokoh antar-umat beragama. Hal ini diarahkan dalam rangka pengembangan kehidupan yang diridhai Tuhan; kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Di saat yang sama, mereka tetap teguh dengan keimanan mereka karena dengan partikularitas itu hanya agama mereka yang paling "sesuai" dengan diri mereka.

Pada sisi yang lain, pendidikan agama hendaknya diintegrasikan secara padu dengan keilmuan yang lain sehingga tidak menimbulkan pandangan dikotomis yang bisa menimbulkan anggapan bahwa antara pendidikan agama dengan keilmuan yang lain terdapat perbedaan nilai dan keutamaan. Untuk pemaduan ini, nilai-nilai universal agama perlu dikontektualisasikan dengan kenyataan kehidupan dalam berbagai dimensinya; sosial, politik, ekonomi, budaya dan semacamnya. Nilai-nilai agama perlu dijadikan landasan kehidupan tanpa terperangkap dengan simbol dan formalisme yang kaku. Justru yang dimunculkan adalah sikap agama yang positif terhadap kehidupan.

Akhirnya, semua itu hendaknya diletakkan pada penilaian obyektif terhadap kemampuan seseorang dalam memahami dan melaksanakan nilai dan ajaran tersebut, khususnya dalam melakukan interaksi dan kerjasama dengan umat dari agama lain. Hanya melalui pola pendekatan semacam itu, pendidikan agama dapat mencerahkan umat manusia dan kehidupan. Mereka akan memiliki iman yang kokoh dan sekaligus mampu memahami dan menghormati pemeluk agama yang lain yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kerjasama yang kokoh untuk merangkai kedamaian dan kesejahteraan yang abadi. ©

Persoalan menjadi kian runyam ketika perang cenderung membuta-tulikan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Manusia yang telah menjadi mesin perang akan membuat tolok ukur kebenaran dan kejahatan berdasarkan kriteria-kriteria subyektif dalam kerangka keangkuhan dan rigiditas kedirian. Pembalikan logika untuk menjustifikasi tindakan menjadi sulit untuk dihindari. Ujung-ujungnya hanya akan mengantarkan kepada suatu kesimpulan yang telah direkayasa bahwa diri dan kelompok sendiri yang benar, dan kelompok lain adalah sesat, jahat, dan tidak akan pernah benar.

Senyatanya manusia dalam perspektif Islam dilahirkan dengan fitrah yang cenderung kepada kebenaran dan kedamaian. Kesejatiannya akan mengantarkan manusia kepada potensi untuk melihat dan menyikapi kehidupan sebagai amanah Tuhan yang harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan universal. Dalam kondisi fitrahnya, manusia akan menyikapi kehidupan sebagai milik "bersama", di mana setiap manusia, atau bangsa apa pun berhak untuk menikmati ketenangan dan kesejahteraan hidup, serta pada saat yang sama mereka memiliki kewajiban untuk menciptakan kehidupan semacam itu.

Dalam rangka pencapaian kehidupan seperti itu, manusia dituntut –meminjam ungkapan Elshstain (1995: 66) –membangun *political body* yang dapat mengantarkannya kepada kebersamaan, menciptakan *kekami-an*, dan sekaligus memberikan kemampuan untuk tetap berbeda, serta dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang terdapat pada orang (atau kelompok, pen.) lain. Terkait dengan itu, kehidupan yang demokratis menjadi salah satu syarat mutlak untuk dijadikan referensi dalam kehidupan.

Demokrasi –menurut Neuhaus, sebagaimana dikutip Euben (2002: 257) –merupakan proses politik yang religius karena demokrasi menyangkut pertanyaan-pertanyaan moral tentang yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk. Artinya, ketika pandangan-pandangan moral itu telah dihilangkan dalam proses pengambilan kebijakan politik berarti hal itu merupakan kebijakan yang tidak demokratis. Kedamaian dilihat dari perspektif mana pun adalah kebaikan, sedangkan kekerasan merupakan kejahatan.

Rakyat atau masyarakat di satu pihak, dan moralitas di pihak lain merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Suara masyarakat perlu didengar karena mereka menyuarakan moralitas. Demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang mampu menangkap kearifan dan pandangan-pandangan moral seluruh masyarakat, bahkan seluruh umat manusia. Ketika masyarakat telah sepakat untuk menolak perang dan kekerasan, tapi perang tetap dilaksanakan, maka keputusan itu adalah tidak demokratis dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai moral.

Secara substansial Islam memiliki nilai dan ajaran yang nyaris tidak memiliki perbedaan signifikan dengan pola pandang seperti itu. Sebagaimana diungkap Eaton, (2002: 483, 506), manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai proyeksi dimensi vertikal ke dalam tataran horizontal dituntut mampu bangkit (dengan kemampuannya mengetahui realitas) melampaui egonya yang bersifat duniawi dan kontingen. Umat Islam diwajibkan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat bukan seperti apa adanya melainkan bagaimana seharusnya. Dalam ungkapan yang lain, manusia, terutama umat Muslim memiliki kewajiban moral-teologis untuk mempersembahkan karya dan aktivitas yang terbaik kepada manusia yang lain dan kepada alam semesta sehingga sifat-sifat Tuhan yang Mahapengasih, dan Mahadamai membumi secara kokoh dalam kehidupan,

Nilai-nilai demokratis dan teologis sebagaimana dipaparkan sebelum ini tidak pernah memberikan ruang sedikit pun bagi pengembangan kekerasan. Karena itu, kehidupan dan cara yang damai dilihat dari *angle* mana pun adalah pilihan terbaik untuk dikembangkan dalam kehidupan. Namun realitas telah berbicara lain. Elshrain tidak salah menamakan bukunya (yang dikutip penulis) dengan judul *Democracy on Trial* karena senyatanya nilai-nilai demokrasi belum berlabuh secara kokoh dalam kehidupan ini.

Demokrasi dengan nilai-nilainya sebagai pembebasan manusia dari segala kebiadaban telah memfosil menjadi sekadar aksesoris yang tidak mampu mengubah sikap dan perilaku manusia yang serakah dan gila perang menjadi manusia yang lebih beradab dan cinta damai. AS yang mengklaim dirinya sebagai negara paling demokratis telah membiaskan nilai-nilai demokrasi untuk kepentingan kelompok sendiri dan segelintir elit yang berkuasa. Akibatnya, kehidupan demokratis yang bertujuan untuk kedamaian dan kesejahteraan tidak lebih sekadar slogan yang terkesan kian jauh dari jangkauan umat manusia.

Gerakan anti perang yang saat ini sedang terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia sebenarnya dapat menjadi kekuatan moral melawan serta menghentikan kekerasan dan perang. Agar kekuatan moral itu memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, gerakan ini dituntut memunculkan diri sebagai kekuatan yang sistematis yang memiliki jangkauan luas sehingga memiliki *pressure power* yang dapat menyadarkan manusia bahwa kekerasan dan perang hanya akan membuat penderitaan, dan penderitaan merupakan kondisi yang tidak pernah dikehendaki oleh siapa pun juga.

Bersamaan dengan itu, masyarakat anti perang dituntut untuk mengkritisi proses perlucutan senjata yang dalam realitasnya hanya diberlakukan bagi negara-negara tertentu. Perdamaian dan keamanan tidak akan pernah terealisasi secara nyata dalam kehidupan jika sebagian negara masih terus menciptakan atau menyimpan alat-

alat pemusnah dan penghancur dunia, apapun alasannya. Adanya persenjataan pemusnah yang dimiliki sebagian negara pasti akan disikapi sebagai ancaman bagi negara lain. Pada gilirannya, negara-negara lain –dengan alasan demi keamanan (yang sebenarnya membuat kian tidak aman) –akan berupaya untuk menciptakan alat yang sejenis. Dengan demikian, keamanan dan kedamaian tidak lebih dari sekadar retorika belaka yang tidak pernah menyentuh realitas kehidupan.

Pada akhirnya, penolakan perang dan kekerasan, serta upaya pengembangan kehidupan yang damai sangat tergantung kepada ketulusan hati nurani dan tanggung jawab kita semua. Selama kehidupan kita masih diperbudak oleh kepentingan diri dan kelompok, serta mempertentangkannya dengan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, selama itu pula celah-celah kekerasan dan potensi perang akan terus membayangi kehidupan. Sebaliknya, jika kita masing-masing telah mampu meletakkan kepentingan masyarakat luas dan umat manusia di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri, maka kedamaian dan kesejahteraan akan segera hadir menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan. ©

Dengan demikian, agama sipil memiliki komitmen yang tidak dapat ditawar untuk meletakkan keadilan, kesetaraan, pluralisme, dan nilai-nilai sejenis sebagai anutan dalam kehidupan bersama, baik sebagai warga suatu negara maupun sebagai warga dunia. Melalui pembumian nilai-nilai itu, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia di berbagai belahan dunia diharapkan dapat menjadi realitas nyata dalam kehidupan.

Nilai-nilai semacam itu telah menumbuhkan semangat perennial yang mengantarkan penduduk daerah-daerah koloni Inggris di benua Amerika untuk berjuang meraih kemerdekaan dengan mendirikan negara baru yang kemudian dikenal dengan *the United States of America* (AS). *The founding fathers* dan beberapa Presiden AS terdahulu, seperti Washington, Adams, Johnson, Jefferson, dan John F. Kennedy merupakan anak-anak terbaik *American civil religion*. Tanpa menyebut atau mengkaitkan dengan agama tertentu, mereka –sebagaimana diungkap Bellah –mengedepankan signifikansi Tuhan atau agama dalam kehidupan sebagai prinsip etika-moral yang harus dijadikan rujukan dalam kehidupan bangsa. Melalui etika-moral universal itu, bangsa dan pemerintah Amerika memiliki kewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang bermoral sehingga warga negara Amerika, dan warga negara lain sama-sama memiliki kesetaraan dalam arti yang hakiki.

Hasil dari semua itu adalah berkembangnya kebebasan dan kesederajatan yang dialami oleh warga negara Amerika, meskipun mereka, masing-masing, memiliki perbedaan dalam sisi etnis, ras, atau agama. Namun persoalan bukan berarti telah selesai. Dalam realitasnya, *stereotyping* yang kemudian memunculkan sitigmatisasi terhadap komunitas tertentu masih muncul ke permukaan. Pada taraf selanjutnya, pola itu justru meluas kepada pengembangan citra negatif terhadap bangsa lain atau dan sebagainya.

Sampai derajat tertentu, hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama sipil Amerika yang dalam sepanjang sejarahnya merupakan proses tarik menarik antara humanisme sekular, evangelisme (dalam pengertian sekular atau teologis), dan nilai-nilai demokrasi yang transformatif. Pada gilirannya aspek "evangelisme" (bukan dalam pengertian gereja murni, tapi dalam arti bahwa dunia lain harus tunduk di bawah kekuasaan Amerika) dalam agama sipil Amerika mengalami penguatan yang cukup berarti. Fenomena semacam itu yang akhirnya menjadikan orang-orang Amerika semacam George W Bush memiliki ambisi untuk menaklukkan negara lain dan menjadikannya sebagai boneka Amerika. Dalam kondisi seperti itu, pluralisme mengalami pemudaran, berganti menjadi absolutisme yang mengancam eksistensi bangsa-bangsa lain di luar Amerika.

Sebagai negara adikuasa, AS dengan absolutisme yang dianutnya tentu sangat membahayakan bagi terciptanya masa depan umat manusia yang lebih cerah. Kenyataan ini senyatanya bukan hanya menjadi keprihatinan masyarakat di luar AS, tapi juga menjadi kecemasan masyarakat AS sendiri. Karena itu, warga negara AS, para kaum intelektual, dan kaum agamanya dituntut untuk mengembalikan *American civil religion* kepada visi awalnya yang *genuine*; yaitu terjadinya transformasi nilai etika-moral keagamaan yang membebaskan dan mencerahkan ke dalam kehidupan konkret umat manusia.

Pencapaian ke arah itu mensyaratkan nilai-nilai agama perlu dikembangkan sebagai nilai universal yang dapat diusung ke wilayah publik yang plural dan sangat beragam. Dalam pengusungan itu, nilai-nilai agama perlu dibebaskan dari keranda formalisme sehingga nilai yang akan lahir nanti merupakan moralitas perennial yang menjadi

kebutuhan semua umat manusia untuk mengembangkan kehidupan mereka yang lebih manusiawi.

Dalam konteks itu, umat Muslim Amerika—sebagai misal—perlu mengembangkan konsep akhlak-politik al-Quran, *al-maslahat al-'am* (kemaslahatan umum), sebagai nilai-nilai yang dapat disumbangkan bagi pembumian visi *civil religion*. Melalui pembumian nilai itu, absolutisme tidak akan mendapatkan tempat lagi untuk berkembang karena hal itu pada prinsipnya bertentangan dengan kepentingan asasi manusia. Demikian pula "*promise land*" yang berasal dari ajaran Hebrew-Christianity perlu dimaknai sebagai adanya hak bagi setiap bangsa untuk mengatur negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara atau pihak lain. Dalam pengertian seperti itu, tanah yang dijanjikan merupakan representasi dari kemerdekaan hakiki yang harus dimiliki setiap bangsa. Bangsa dan negara yang lain, termasuk AS, tidak memiliki hak sedikit pun untuk masuk terlalu dalam, mencampuri persoalan intern suatu bangsa.

Pengembalian agama sipil Amerika kepada visinya yang luhur itu mengharuskan *civil society* yang berkembang di AS untuk memperkuat posisinya secara sistematis, berjejaringan luas, dan *sustainable* sehingga mereka benar-benar memiliki tawar menawar yang cukup tinggi dalam berhadapan dengan negara. Masyarakat sipil yang berkeadaban itu dituntut secara moral untuk memiliki daya tekan yang cukup ampuh dalam melakukan pencerahan terhadap negara yang telah terperangkap ke dalam orientasi kekuasaan semata. Dengan demikian, tindakan imperialistik Amerika mudah-mudahan akan berganti dengan tindakan yang bersifat kenabian yang lebih mengedepankan kasih dan kedamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia. ©

pengejawantahan nilai moralitas yang berintikan humanisasi yang transformatif. Karena itu, ketika pandangan-pandangan moral itu telah dihilangkan dalam proses pengambilan kebijakan politik berarti hal itu merupakan kebijakan yang tidak demokratis. Kedamaian dilihat dari perspektif mana pun adalah kebaikan, sedangkan kekerasan dipandang dari sudut apa pun merupakan kejahatan.

Rakyat atau masyarakat di satu pihak, dan moralitas di pihak lain merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Suara masyarakat perlu didengar karena mereka menyuarakan moralitas.

Demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang mampu menangkap kearifan dan pandangan-pandangan moral seluruh masyarakat, bahkan seluruh umat manusia sehingga menjadi proses pemanusiaan manusia. Ketika masyarakat telah sepakat untuk menolak kekerasan, tapi kekerasan tetap dilakukan, maka keputusan itu adalah tidak demokratis dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai moral yang humanistik.

Secara substansial Islam memiliki nilai dan ajaran yang nyaris tidak memiliki perbedaan signifikan dengan pola pandang seperti itu. Sebagaimana diungkapkan Eaton, (2002: 483, 506), manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai proyeksi dimensi vertikal ke dalam tataran horizontal dituntut mampu bangkit (dengan kemampuannya mengetahui realitas) melampaui egonya yang bersifat duniawi dan kontingen. Umat Islam diwajibkan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat bukan seperti apa adanya melainkan bagaimana seharusnya. Dalam ungkapan lain, manusia, terutama umat Muslim memiliki kewajiban moral-teologis untuk mempersembahkan karya dan aktivitas yang terbaik kepada manusia lain dan kepada alam semesta sehingga sifat-sifat Tuhan yang Mahapengasih, dan Mahadamai membumi secara kokoh dalam kehidupan.

Nilai-nilai demokratis dan teologis sebagaimana dipaparkan sebelum ini tidak pernah memberikan ruang sedikit pun bagi pengembangan kekerasan dan segala bentuk barbarisme. Karena itu, kehidupan dan cara yang damai dilihat dari *angle* mana pun adalah pilihan terbaik untuk dikembangkan dalam kehidupan.

Namun realitas telah berbicara lain. Irak telah hancur berantakan, dan Aceh tidak pernah mengalami damai yang sebenarnya. Elshaintain tidak salah menamakan bukunya (yang dikutip penulis di atas) dengan judul *Democracy on Trial* karena senyatanya nilai-nilai demokrasi belum berlabuh secara kokoh dalam kehidupan. Demokrasi dengan nilai-nilainya sebagai pembebasan manusia dari segala kebiadaban telah memfosil menjadi sekadar aksesoris yang tidak mampu mengubah sikap dan perilaku manusia yang serakah dan gila kekerasan menjadi manusia yang lebih beradab dan cinta damai.

Gerakan anti kekerasan, atau anti perang yang terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia beberapa waktu yang lalu sebenarnya dapat menjadi kekuatan moral melawan serta menghentikan kekerasan dalam kehidupan. Agar kekuatan moral itu memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, gerakan ini dituntut memunculkan diri sebagai kekuatan yang sistematis yang memiliki jangkauan luas sehingga memiliki *pressure power* yang dapat menyadarkan manusia bahwa kekerasan dan barbarisme hanya akan membuat penderitaan umat manusia; dan penderitaan merupakan kondisi yang tidak pernah dikehendaki oleh siapa pun juga.

Bersamaan dengan itu, masyarakat anti kekerasan dituntut untuk mengkritisi proses perlucutan senjata yang dalam realitasnya hanya diberlakukan bagi negara-negara tertentu. Perdamaian dan keamanan tidak akan pernah terealisasi secara nyata dalam kehidupan jika sebagian negara (apapun alasannya) masih terus menciptakan atau menyimpan alat-alat pemusnah massal dan penghancur dunia. Adanya persenjataan pemusnah yang dimiliki sebagian negara pasti

akan disikapi sebagai ancaman bagi negara lain. Pada gilirannya, negara-negara lain –dengan alasan demi keamanan (yang sebenarnya membuat kian tidak aman) –akan berupaya untuk menciptakan alat yang sejenis. Dengan demikian, keamanan dan kedamaian tidak lebih dari sekadar retorika belaka yang tidak pernah menyentuh realitas kehidupan.

Pada akhirnya, penolakan terhadap kekerasan serta upaya pengembangan kehidupan yang damai sangat tergantung kepada ketulusan hati nurani dan tanggung jawab seluruh umat manusia secara bersama. Selama kehidupan sebagian mereka masih diperbudak oleh kepentingan diri dan kelompok, serta mempertentangkannya dengan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, selama itu pula celah-celah kekerasan akan terus membayang-bayangi kehidupan.

Sebaliknya, jika kita masing-masing telah mampu meletakkan kepentingan masyarakat luas dan umat manusia di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri, maka kedamaian dan kesejahteraan akan segera hadir menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan. ©

kita tercinta masih lebih bersifat formal dan belum seutuhnya menyentuh makna demokrasi yang hakiki. Hal itu dapat dilihat dari keberadaan demokrasi yang –sampai batas tertentu –masih dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meneguhkan *status quo*.

Para elit politik dan penguasa berlindung di balik nama mayoritas yang telah direkayasa sedemikian rupa untuk sekadar meraih atau melanggengkan kekuasaan yang selama ini digenggamnya. Pada saat yang sama, mereka dengan menggunakan media atau terma-terma hukum yang telah "dijinakkan" dan retorika keadilan yang *biased* berupaya lari dari tanggung jawab atas dosa-dosa sosial mereka yang sejatinya lambat laun menggerogoti keabsahan negara dan legitimasi pemerintahan.

Dalam kondisi semacam itu, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk melibatkan diri atau berpartisipasi dalam ikut mengontrol terhadap proses pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setiap upaya untuk masuk ke dalam proses itu, mereka akan terbentur pada formalisme *rigid* yang sudah diberi label demokrasi dan akan masuk ke ruang labirin yang tidak bertepi. Pada sisi itu, lembaga-lembaga demokrasi formal –legislatif, eksekutif, dan yudikatif –beserta segala bentuk derivasinya belum sepenuhnya dapat merealisasikan makna dan hakikat demokrasi yang substantif.

Kenyataan seperti itu merupakan bercak-bercak hitam yang terus mewarnai proses demokratisasi yang sedang berjalan di negara tercinta. Noda yang masih melekat pada kehidupan bangsa ini menjadikan demokrasi Indonesia berada dalam implimentasi yang sangat rendah dan sekadar berjalan di atas permukaan sehingga partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dan seumpamanya menjadi sangat lemah. Kondisi itu memberi peluang besar bagi berkembangnya korupsi, KKN dan sejenisnya.

prinsip-prinsip luhur itu hanya akan melahirkan kekerasan atau anarkisme, serta diyakini tidak akan pernah mematikan akar-akar kejahatan tersebut.

Pada ranah itu, KPK perlu memosisikan dirinya. Dalam ungkapan lain, komisi ini mutlak dituntut untuk mengembangkan seluruh rencana, kerja dan langkahnya di atas bingkai nilai-nilai demokrasi substansial. Komisi dituntut untuk menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam rencana yang strategis yang kemudian dikonkretkan ke dalam langkah-langkah operasional yang intens dalam bingkai kerja yang sistematis, serta holistik. Transparansi, misalnya, merupakan keharusan yang perlu dikembangkan KPK dalam menguak dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan praktik korupsi dan sejenisnya sehingga mendapat kepercayaan, dukungan, serta partisipasi penuh masyarakat luas.

Di atas semua itu, gerakan sosial anti korupsi dalam bentuk pengawasan dan tekanan-tekanan masyarakat terhadap pemerintah dan *class action* terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat –sebagaimana dinyatakan Teten Masduki (*Kompas*, 18/12/2003) – menjadi mutlak untuk dikembangkan.

Persoalannya, sejauh mana niat tulus dan komitmen kita semua, bangsa ini untuk menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai acuan pokok dalam membangun negara dan bangsa, serta meletakkannya dalam bingkai moral-agama yang substansial. Tanpa pengembangan dan pbumian demokrasi substansial, maka KPK hanya akan menjadi sebutir pasir di pantai yang sangat luas; eksistensinya tidak akan bermakna signifikan bagi pemberantasan korupsi, atau bahkan ia bisa terhanyut, ikut arus, dan larut dalam praktik-praktik kotor yang sejenis. ©

**CIVIL RELIGION, PENGEMBANGAN
KEBERAGAMAAN INDONESIA KE DEPAN**

Penarikan agama formal ke persoalan-persoalan yang bersifat publik ditengarai tampak kian menguat, terutama di Indonesia akhir-akhir ini. Gejala ini membuat sebagian orang khawatir, mengkritisi akan terjadinya dominasi agama formal yang rigid atas wilayah publik yang berdimensi plural dan terdiri dari elemen-elemen yang sangat beragam.

Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran semacam itu tidak dapat diartikan sebagai penolakan kehadiran agama di ruang publik. Pada umumnya mereka yang mencoba mengkritisi itu menolak agama formalistik yang berwujud dalam otoritarianisme yang membelenggu sebagian (besar) tokoh agama dengan karakteristiknya yang *one sided truth claim*. Agama formalistik semacam ini cenderung sangat kaku, menolak komunikasi dialogis bukan hanya dengan penganut agama lain, tapi juga dengan penganut yang seagama tapi berbeda aliran.

Dalam realitasnya, manakala agama ini diusung ke ranah sosial, maka yang terjadi adalah pemaksaan atas nama Tuhan –dari yang halus hingga kasar –terhadap publik untuk mentaati segala aturannya. Setiap orang atau kelompok yang menolak dianggap melawan agama sehingga "atas nama agama" sah untuk didiskreditkan dalam beragam bentuknya. Pada sisi itu beragam persoalan muncul ke ruang publik, dari konflik yang tidak terselesaikan hingga pertentangan yang

bernuansa kekerasan. Bukan tidak mustahil bangsa ini akan menuju kehancurannya akibat berkembangnya keberagamaan yang tidak kondusif.

Pelajaran bagi Indonesia

Dalam perspektif sejarah modern, hubungan agama formal dengan negara memang sering menyulut persoalan krusial. Dalam suatu bangsa yang masyarakatnya pun relatif homogen dalam sisi agama, persoalan seputar itu tetap saja mengedepan. Untuk ini, Pakistan menjadi salah satu contoh paling konkret yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Kendati hampir seluruh elemen bangsa Pakistan pada saat berdirinya negara itu sepakat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, tapi masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam itu sendiri dengan aspirasi yang berbeda pula. Pandangan mereka tentang negara Islam Pakistan dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan etnis mereka yang sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain.

Akibatnya, selama dua dekade sejak kelahirannya Pakistan disarati dengan pertentangan antar berbagai kelompok yang tak kunjung padam. Pengesahan konstitusinya memakan waktu sekitar sembilan tahun. Bahkan pemisahan Pakistan menjadi dua tetap tidak dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas. Selama itu pula kekerasan terus mengiringi pertentangan yang terjadi.

Indonesia perlu belajar dari kasus semacam Pakistan. Sejatinnya pada awal berdirinya republik ini, *the founding fathers/ mothers* telah melakukan terobosan kreatif, *enlighting*, yang berjangkauan sangat jauh ke depan. Ruang dialog yang terbuka lebar saat itu mengantarkan mereka untuk meletakkan Negara di atas dasar-dasar yang sangat kondusif bagi pluralitas kehidupan dan sekaligus pengembangan nilai-nilai asasi agama.

Dengan sikap itu, mereka mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan moral universal yang disapih dari simbol-simbol agama serta dapat diterima di ranah publik melalui komunikasi kritis dan suasana dialogis, penuh kejujuran dan keterbukaan.

Pengembangan *civil religion* ini meniscayakan eliminasi –meminjam tawaran El Fadl (*Speaking in God's Name*, 2003) –terhadap otoritarianisme keagamaan dan pengembangan keotoritatifan. Sementara yang pertama cenderung menyamakan kehendak Yang Mutlak dengan kehendaknya sendiri, serta meminggirkan makna dan otonomi teks-teks suci (ajaran agama), maka yang terakhir lebih mengedepankan upaya untuk memahami dan mengeksplor ide-ide Tuhan yang Mutlak tanpa bermaksud menyamakan diri sendiri dengan Tuhan. Pengembangan pemahaman agama yang otoritatif ini menuntut dari penganut agama sikap *honesty, diligence, comprehensiveness, reasonableness, dan self-restraint*.

Melalui sikap itu, para penganut agama dituntut untuk tanpa henti memperluas wawasan, serta berusaha memahami persoalan, realitas dan fenomena secara utuh dari berbagai dimensinya. Pada saat yang sama, mereka juga mengakui secara jujur keterbatasan diri mereka sehingga memunculkan keberagamaan yang rendah hati dan mengabdikan kepada kepentingan manusia. Dengan demikian, kontastasi simbol-simbol agama dapat diminimalisasi, dan politisasi nama Tuhan dapat dihindari. Jutsru yang akan berkembang adalah kerjasama di antara para penganut agama untuk menegakkan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan, serta perjuangan melawan degradasi moral sosial, dari korupsi hingga kepemilikan kekuasaan. ©

terjangkau. *Pertama*, organisasi keagamaan perlu menyegarkan kembali komitmen untuk seutuhnya memfokuskan kiprah organisasi dalam pemberdayaan dan "pencerdasan" keagamaan masyarakat. Program dan kegiatannya hendaknya diarahkan kepada pengembangan dan perluasan horizon keagamaan umat dan sekaligus penubuhan moralitas keagamaan substantif dalam kehidupan. Dalam tataran itu pula, organisasi keagamaan mana pun diharapkan tidak terpancing dengan pesona-pesona sesaat yang akan bisa memudahkan visi organisasi, semisal tarikan ke dunia politik kekuasaan.

Kedua, partai politik, dan lembaga yang lekat dengan politik kekuasaan harus bersikap lebih dewasa dan mengembangkan sikap *fairness* dengan tidak menjadikan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendukung program dan meraih tujuannya. Pencarian dukungan hendaknya dikembangkan melalui tawaran-tawaran program realistis, *reasonable* dan benar-benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

Ketiga, sejalan dengan itu pendidikan agama di berbagai tingkatan dan bidang perlu dirumus-ulang menjadi pendidikan yang bernilai signifikan dan fungsional bagi *stakeholders* dan kehidupan. Untuk itu, perlu ada penelaahan ulang yang holistik terhadap pendidikan agama serta segala aspek dan unsur yang berkaitan dengan itu. Bahan ajar, metode pembelajaran, evaluasi dan sebagainya mutlak dikritisi dan direformulasi untuk diarahkan sesuai dengan visi agama masing-masing.

Mudah-mudah kita masih memiliki komitmen untuk melakukan reformulasi keberagamaan kita dan menjadikannya lebih bermakna. Tanpa itu, agama tanpa penganut dalam artian telanjang dan sebenar-sebenarnya akan menjadi realitas yang sama sekali tidak bisa dipungkiri siapa pun juga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan*, Terjemahan, Cetakan II, Jakarta – Bandung: PT Serambi Ilmu Semesta- Penerbit Mizan, 2001.
- Barney Gerald O., *Global 2000 Revisited: What Shall We Do*, <http://www.millenniuminstitute.net>
- Barney, Gerald O., *Global 2000 Revisited: What Shall We Do*, <http://www.millenniuminstitute.net>
- Bell, Catherine, *Ritual: Perspectives and Dimensions*, Oxford – New York: Oxford University Press, 1997.
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World*, New York, Evanston, dan London: Harper & Row, Publishers, 1970
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX; Inggris-Jerman*, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Cassanova, José, *Public Religions in the Modern World*, Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1994.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Cetakan I, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Darmaputera, Eka, "Perbandingan Agama: Memperbandingkan atau Mempertandingkan ?", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Cetakan II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Eaton, Charles Le Gai, "Manusia" dalam Seyyed Hossein Nasr (ed.), *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*, Terjemahan, Cetakan I, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Edwards, Peter, "The Future of Ethics" dalam Oliver Leaman (ed.), *The Future of Philosophy towards the 21st Century*, London: Routledge, 1998.
- Elshtain, Jean Bethke, *Democracy on Trial*, New York: BasicBooks, 1995.
- Euben, Roxanne L., *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, Terjemahan, Cetakan I, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2000.
- Henderson Jr., Charles P., *God and Science: The Death and Rebirth of Theism*, Atlanta: John Knox Press.
- IDEA, *Nestapa Pembangunan Sosial: Studi atas Dampak Beban Utang terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan*, Cetakan I, Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2001.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *al-'Aql al-Akhlaqi al-'Arabi: Dirasah Tahliyah Naqdiyah li Nazhm al-Qiyami fi al-Tsaqafah al-'Arabiyah*, Maghrib: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 2001.
- Lubis, Muchtar, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*, Cetakan V, Jakarta: Yayasan Idayu, 198.

- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Masduki, Teten, "Antiklimaks KPK" dalam *Harian Kompas*, Kamis 18 Desember 2003.
- Mönks, F. J. et. al., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Ideals and Reality of Islam*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1975.
- Pabottingi, Muchtar, "Politik Menyantuni Pluralitas" dalam *Harian Kompas*, Edisi Khusus Ulang Tahun ke-35, Rabu 28 Juni, 2000.
- Panikkar, Raimundo, "Dialog yang Dialogis" dalam Ahmad Norma Permata (ed.), *Metodologi Studi Agama*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rahman, Fazlur, "Islamisasi Ilmu, Sebuah Respons", Terjemahan dalam *Jurnal Ulumul Quran*, Vol. III, No. 4, Th. 1992.
- , "Persepsi tentang Masyarakat yang Diinginkan Dalam Agama yang Berbeda-beda: Kasus Islam", dalam *Islam Modern: Tantangan Pembaharuan Islam*, Kumpulan Artikel, Rusli Karim dan Hamid Basyaib (eds.), Cetakan Pertama, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1987.
- , *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- , *Islam*, Edisi Kedua, Chicago & London: University of Chicago Press, 1979.
- , *Major Themes of the Quran*, Edisi Kedua, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989.

- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, Cetakan Pertama, Bandung: Mizan, 1986.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Terjemahan, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cetakan V, Jakarta: ANteve – Penerbit Mizan, 1999.
- Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Cetakan II, INSIST-Pustaka Pelajar, 2000.
- Sindhunata, "Setitik Nyala dalam Kegelapan" Rubrik Tanda-Tanda Zaman dalam Jurnal *Basis*, Nomor 09-10, Tahun ke-50, September-Oktober 2001.
- Soroush, Abdul Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Smolla, Rodney A., "Hak Masyarakat untuk Tahu: Transparansi di dalam Lembaga-Lembaga Pemerintahan" dalam Jurnal Demokrasi, Office of International Information Programs U.S. Departement of State, Tth.
- Stenger, Mary Ann, "Religious Pluralism and Cross-Cultural Criteria of Religious Truth" dalam Thomas Dean (ed.), *Religious Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*, Albany: State University of New York Press, 1995.
- Tibbi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, Cetakan II, Boulder, San Francisco, & Oxford: Westview Press, 1991.
- , *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998.

Yusuf Ali, Abdullah, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, Maryland: Amana Corporation, 1989.

SUMBER TULISAN

BAGIAN PERTAMA: AGAMA TANPA PENGANUT:
MEMUDARNYA NILAI-NILAI MORAL

Kehidupan Kontemporer dalam Teologi yang Mandul (*Kompas*, Jumat 9 November 2001)

Agama Tanpa Penganut, (*Kompas*, Jumat 6 September 2002)

Menyoal Keberagamaan Dominan (*Kompas*)

Islam And Theology Of Power Dalam Konteks Indonesia (Kompas)

Kekerasan, Sumbangan Modernisasi dan Fundamentalisme Agama,
(*Kompas*, Jumat 1 Februari 2002)

Menurunnya Kualitas Manusia dan Ancaman Kekerasan di Masa Depan, (*Kompas*, Sabtu 19 Juli 2003)

Kejujuran, Moralitas Bangsa yang Tergadaikan (*Kompas*, Senin 27 Mei 2002).

Infantilisme Bangsa (*Kompas*,)Budaya Politik dalam Dunia Pendidikan (*Jawa Pos*)

BAGIAN KEDUA: PEMBACAAN KEMBALI SIMBOL DAN RITUAL AGAMA

Keberagamaan Umat Dan Signifikansi Teologi Kritis (*Kompas*, Jumat 26 November 2004)

Dari Konflik Menuju Dialog yang Dialogis (*Kompas*)

Signifikansi Peringatan Maulid (*Kompas*, Sabtu 8 April 2006)

Signifikansi Isra' Mi' Raj Dalam Konteks Kekinian (*Kompas*)Puasa Bersama Kaum yang Terpinggirkan (*Kompas*)

International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Jakarta, 2003 sampai sekarang, hingga anggota paripurna Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2007-2009 (non-aktif).

Tulisan-tulisannya dapat dijumpai dalam buku, bunga rampai, hingga artikel dan kolom di surat kabar Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Jawa Pos, Republika, dll. Beberapa buku yang ditulisnya : Melampaui Dialog Agama, Kumpulan Tulisan Opini Kompas, Penerbit Kompas (2002), Dari Neomodernisme ke Islam Liberal, Paramadina (2003), Pembaruan Pesantren, Pustaka Pesantren, LKiS, (2006), dan menjadi tim penulis dalam Praksis Pembelajaran Pesantren, LKiS (2007). Atas produktivitasnya menulis, beliau mendapat penghargaan sebagai dosen terbaik dalam karya tulis ilmiah di lingkungan perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia tahun 2004. Tahun 2007, Abd A'la mendapat penghargaan sebagai dosen teladan di lingkungan perguruan tinggi Islam se-Indonesia.

Setelah menjabat sebagai Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005-2009), saat ini Abd A'la menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan SDM IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009-13).